



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I TA. 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) selama Triwulan I Tahun 2023 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kegiatan serta kinerja BRPBATPP selama Triwulan I tahun 2023 sebagai organisasi di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan, selain itu diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pencapaian kinerja untuk kedepannya.

Bogor, 18 April 2023
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si.
NIP. 197512162003122002



DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
D. Keragaan Sumberdaya Manusia BRPBATPP.....	5
E. Potensi Permasalahan dan Lingkungan Strategis.....	13
F. Sistematika Laporan Kinerja.....	19
II. PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis.....	21
B. Rencana Kerja Tahun 2023.....	29
C. Perjanjian Kinerja (PK) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023.....	30
D. Pengukuran Kinerja.....	36
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2023.....	37
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Triwulan I Tahun 2023.....	38
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2023.....	99
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023.....	103
IV. PENUTUP.....	106
A. Capaian Kinerja Utama.....	106
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	109
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

NOMOR	JUDUL TABEL	HAL
1.1.	Jumlah Pegawai Lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I TA. 2023 Berdasarkan Penempatan Unit Kerja	6
1.2.	Keragaan Sumberdaya Manusia BRPBATPP Triwulan I TA.2023.....	6
1.3.	Aset BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023.....	14
1.4.	Anggaran BRPBATPP TA.2018-2022.....	16
2.1.	Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Penyuluhan KP BRPBATPP Tahun 2018-2022.....	23
2.2.	Hasil Reviu atas Revisi Rencana Strategis BRPBATPP Tahun 2023.....	27
2.3.	Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dengan Pusat Riset Perikanan.....	30
2.4.	Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dengan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	32
2.5.	Perjanjian Kinerja Gabungan antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA.2023.....	33
3.1.	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023.....	38
3.2.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	42
3.3.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	44
3.4.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	47
3.5.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	49
3.6.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	51
3.7.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	62
3.8.	Akun Penerimaan PNBPFungsional dan Umum BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023.....	



		63
3.9.	Penerimaan PNPB BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023.....	63
3.10.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	65
3.11.	Nama Kompetensi dan Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan.....	67
3.12.	Nilai Kinerja Berdasarkan Nilai SKP.....	67
3.13.	Nilai Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin.....	67
3.14.	Kategori ASN Berdasarkan Nilai IP ASN.....	68
3.15.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 8 pada Triwulan I Tahun 2023.....	68
3.16.	Kategori Nilai SAKIP.....	70
3.17.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9 pada Triwulan I Tahun 2023.....	71
3.18.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 10 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	73
3.19.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 11 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	76
3.20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP pada Triwulan I TA.2023.....	76
3.21.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 12 pada Triwulan I Tahun 2023.....	78
3.22.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 13 pada Triwulan I Tahun 2023.....	84
3.23.	Kategori Penilaian Kinerja Anggaran.....	88
3.24.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 14 pada Triwulan I Tahun 2023.....	84
3.25.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 15 pada Triwulan I Tahun 2023.....	91
3.26.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 16 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	95
3.27.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 17 Pada Triwulan I Tahun 2023.....	98
3.28.	Revisi DIPA BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023.....	100
3.29.	Pagu dan Realisasi Anggaran BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023 (per jenis belanja).....	100
3.30.	Realiasi Anggaran Per Indikator Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023.....	101
3.31.	Realiasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023.....	103
3.32.	Perhitungan Efisiensi Anggaran BRPBATPP Triwulan I TA.2023.....	104
4.1.	Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023..	107

DAFTAR GAMBAR

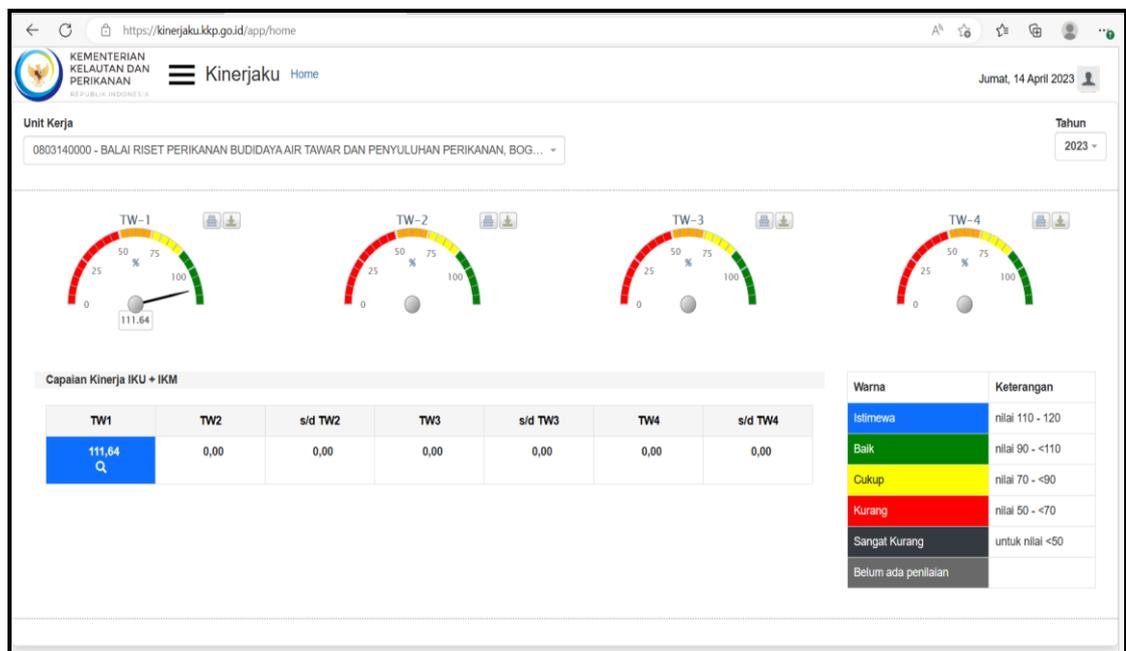
NOMOR	JUDUL GAMBAR	HAL
1.1.	Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.....	5
1.2.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Jabatan Pada Triwulan I TA.2023.....	10
1.3.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Triwulan I TA.2023.....	11
1.4.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Golongan Ruang Pada Triwulan I TA.2023.....	11
1.5.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Kelompok Umur Pada Triwulan I TA.2023.....	12
1.6.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Triwulan I TA.2023.....	12
3.1.	Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I TA. 2023.	37
3.2.	Dokumentasi Kegiatan SFV Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Triwulan I TA.2023.....	54
3.3.	Dokumentasi Kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut pada Triwulan I TA.2023.....	58
3.4.	Progres Nilai IP ASN pada Triwulan I Tahun 2023 pada http://www.ropeg.kkp.go.id/	69
3.5.	Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan I TA.2023.....	85
3.6.	<i>Screenshot</i> Dashboard Aplikasi SMART DJA Triwulan I TA.2023.....	89
4.1.	Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I TA. 2023 pada Dashboard Kinerjaku.....	106



RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dalam upaya untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh program kerja BRPBATPP didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) yang diterapkan pada sasaran strategis dalam Rencana Strategi (Renstra) BRPBATPP Tahun 2020-2024, yang diikuti dengan rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja tahunan secara konsisten dan berkesinambungan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023. Ketiga Sasaran Kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 111,64 sebagaimana dashboard kinerja berikut ini :



Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan BRPBATPP di akhir Triwulan I TA. 2023, dari 17 IK BRPBATPP yang terdapat

target ada 7 indikator kinerja dengan rincian capaian adalah : 3 (tiga) indikator kinerja memiliki capaian kinerja istimewa dengan indikator kinerja berwarna biru dan mencapai nilai 110–120, dan 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian kinerja baik dengan indikator kinerja berwarna hijau dan mencapai nilai 90-<110.

Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN I TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	3.800	460	552	120,00
	2 Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	120	-	-	-
	3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	268	90	103	114,44
	4 Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889	-	-	-
2 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5	-	-	-
3 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6 Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092	0,092	0,180	195,74 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
	7 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan	≤0,5	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN I TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
	Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)				
	8 Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78	-	-	-
	9 Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5	-	-	-
	10 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92	-	-	-
	11 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92	92	100	108,70
	12 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
	13 Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	-	-	-
	14 Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-
	15 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2	-	-	-
	16 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100	100	100	100
	17 Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100	100	100	100

Secara umum kinerja BRPBATPP cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. IKU dengan Target Tahunan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, untuk memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Verifikasi capaian terutama untuk kegiatan penyuluhan perlu dilakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada.

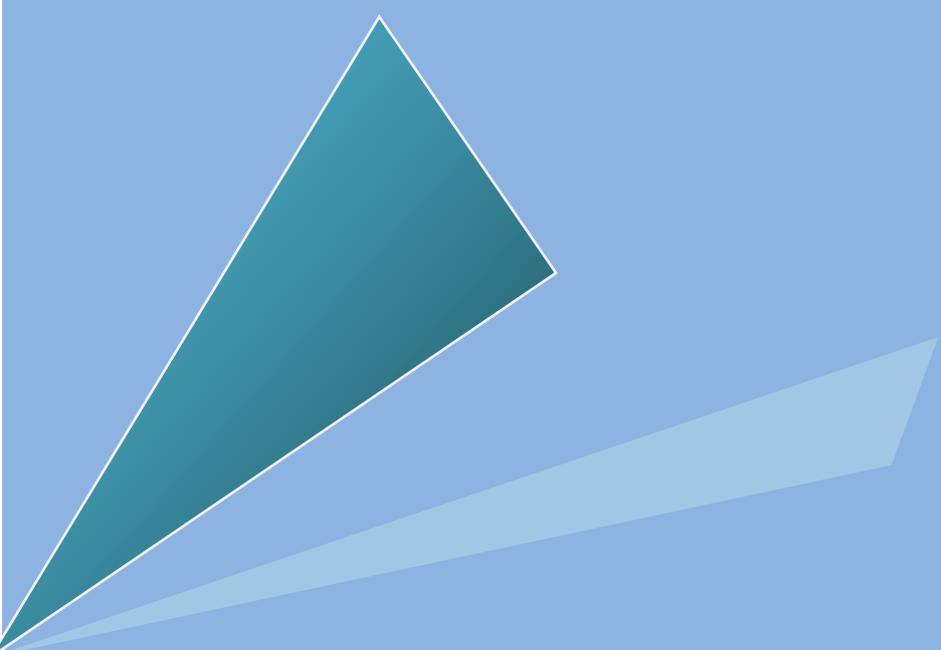
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBATPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP. Akhirnya, BRPBATPP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBATPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) BRPBATPP Triwulan I tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPBATPP.

BAB I.

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
 - B. TUJUAN**
 - C. TUGAS DAN FUNGSI**
 - D. KERAGAAN SDM BRPBATPP**
 - E. POTENSI, PERMASALAHAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS**
 - F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA**
- 

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai BRPBATPP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BRPBATPP guna memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang.

Dalam melaksanakan program penelitian dan pengembangan BRPBATPP sebagai unit pelaksana teknis dibawah Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang tidak hanya sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa mengukur besarnya dana bisa mendorong seberapa besar peningkatan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, sebagai hakekat dari anggaran berbasis kinerja.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BRPBATPP diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;
2. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja kepada Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP).

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, BRPBATPP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2023 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Triwulan I Tahun Anggaran 2023 yang dilaporkan pada akhir Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRPBATPP Triwulan I TA.2023 memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2023;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPBATPP untuk meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No : 74/PERMEN-KP/2020 adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, BRPBATPP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan;
2. Pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar dibidang perbenihan dan genetik populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
4. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

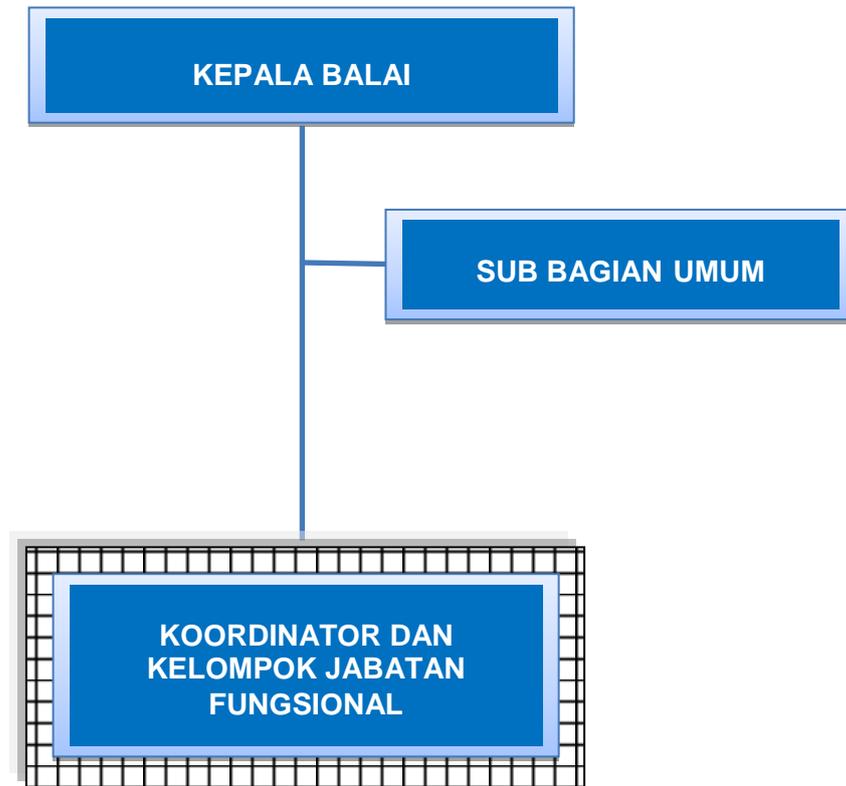
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Setiap unsur di lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Berikut adalah struktur organisasi di BRPBATPP berdasarkan Permen KP Nomor : 74/PERMEN-KP/2020.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

D. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA BRPBATPP

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP Nomor : 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBATPP. BRPBATPP mengemban tugas sebagai balai riset perikanan budidaya air tawar dan sebagai balai penyuluhan perikanan yang memiliki wewenang sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) penyuluhan perikanan yang terdiri dari 41 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu : Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Jumlah pegawai Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor pada bulan Maret 2023 adalah sebanyak 218 orang yang terdiri dari 202 PNS (terdiri dari 41 orang PNS non Penyuluh Perikanan dan 161 orang PNS Penyuluh Perikanan) dan 256 tenaga kontrak (terdiri dari 50 orang

tenaga kontrak serta 206 orang penyuluh perikanan bantu). Masing-masing pegawai tersebut ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Sempur, Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk, dan Instalasi Riset Lingkungan Perikanan dan Toksikologi Cibalagung dan Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan Depok. Berikut adalah jumlah pegawai BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan penempatan unit kerja yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I TA. 2023 Berdasarkan Penempatan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Sempur	28	-	16	44
2.	Instalasi Riset Plasma Nutfah Budidaya Air Tawar, Cijeruk	5	-	13	18
3.	Instalasi Teknologi, Lingkungan, dan Toksikologi Perikanan Budidaya Air Tawar, Cibalagung	7	-	8	15
4.	Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan, Depok	1	-	10	11
5.	Penyuluh Perikanan (41 Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat)	161	16	180	357
Total		202	16	227	445

Keragaan sumberdaya manusia BRPBATPP berdasarkan jabatan fungsional dan non fungsional, tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jenis kelamin pada Triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Keragaan Sumberdaya Manusia BRPBATPP Triwulan I TA.2023

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
I.	Berdasarkan Jenis Jabatan		
1.	Plt. Kepala Balai (Instruktur Madya)	1	0,46
2.	Kasubbag Umum	1	0,46
3.	Instruktur	2	0,92
4.	Penyuluh Perikanan (PNS)	161	73,85
5.	Penyuluh Perikanan (PPPK)	16	7,34
6.	Pustakawan	1	0,46

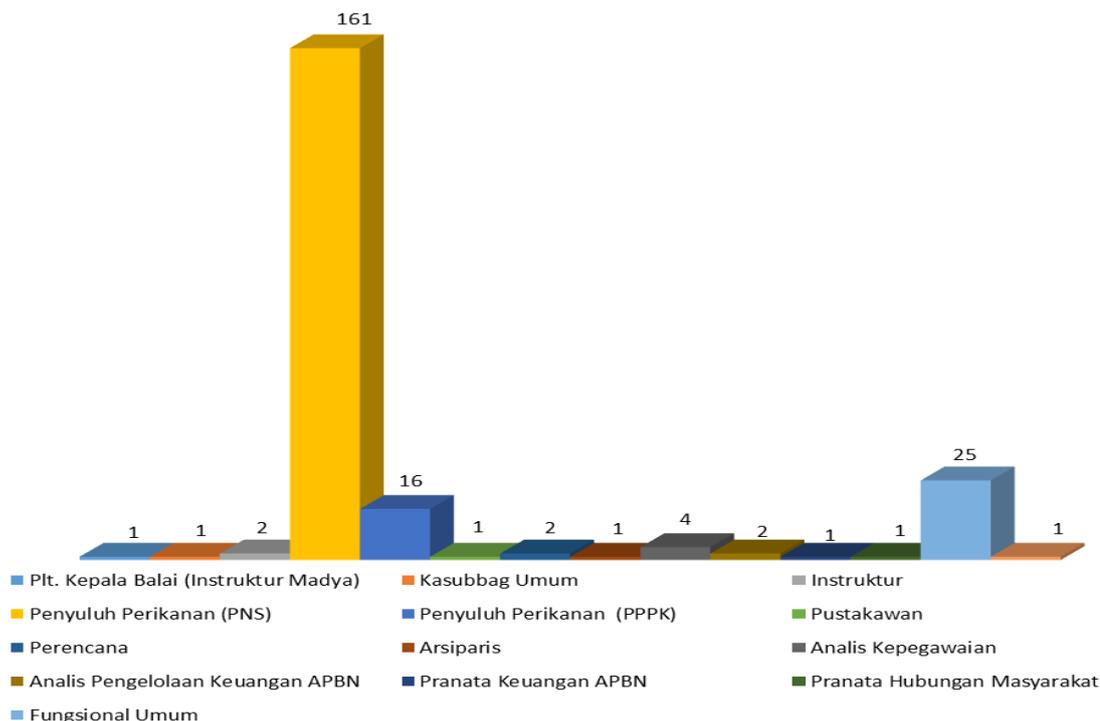
No.	Uraian	Jumlah Orang	%
7.	Perencana	2	0,92
8.	Arsiparis	1	0,46
9.	Analisis Kepegawaian	4	1,83
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	0,92
11.	Pranata Keuangan APBN	1	0,46
12.	Pranata Hubungan Masyarakat	1	0,46
13.	Fungsional Umum	25	11,47
	Total	218	100,00
II.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Penyuluh		
1.	Penyuluh Perikanan Madya	41	23,16
2.	Penyuluh Perikanan Muda	62	35,03
3.	Penyuluh Perikanan Pertama	33	19,21
4.	Penyuluh Perikanan Penyelia	13	7,34
5.	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	11	6,21
6.	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	16	9,04
	Total	177	100,00
III.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Instruktur		
1.	Instruktur Ahli Utama	0	0,00
2.	Instruktur Ahli Madya	1	33,33
3.	Instruktur Ahli Muda	0	0,00
4.	Instruktur Ahli Pertama	2	66,67
5.	Instruktur Penyelia	0	0,00
6.	Instruktur Mahir	0	0,00
7.	Instruktur Terampil	0	0,00
	Total	3	100,00
IV.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Pustakawan		
1.	Pustakawan Utama	0	0,00
2.	Pustakawan Madya	0	0,00
3.	Pustakawan Muda	1	100,00
4.	Pustakawan Pertama	0	0,00
	Total	1	100,00
V.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Perencana		
1.	Perencana Ahli Utama	0	0,00
2.	Perencana Ahli Madya	0	0,00
3.	Perencana Ahli Muda	0	0,00
4.	Perencana Ahli Pertama	2	100,00
	Total	2	100,00

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
VI.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Analisis Kepegawaian		
1.	Analisis Kepegawaian Ahli Utama	0	0,00
2.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	0	0,00
3.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	25,00
4.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	3	75,00
	Total	4	100,00
VII.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Arsiparis		
1.	Arsiparis Ahli Utama	0	0,00
2.	Arsiparis Ahli Madya	0	0,00
3.	Arsiparis Ahli Muda	1	100,00
4.	Arsiparis Ahli Pertama	0	0,00
	Total	1	100,00
VIII.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	0	0,00
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	0	0,00
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	100,00
	Total	2	100,00
IX.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Pranata Keuangan		
1.	Pranata Keuangan Penyelia	1	100,00
2.	Pranata Keuangan Mahir	0	0,00
3.	Pranata Keuangan Terampil	0	0,00
	Total	1	100,00
X.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Pranata Humas		
1.	Pranata Humas Madya	0	0,00
2.	Pranata Humas Muda	1	100,00
3.	Pranata Humas Pertama	0	0,00
	Total	1	100,00
XI.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1.	S3	2	0,92
2.	S2	19	8,72
3.	S1	104	47,71
4.	D4	32	14,68
4.	D3	31	14,22
5.	SMA	27	12,39
6.	SMP	2	0,92
7.	SD	1	0,46

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
	Total	218	100,00
XII.	Berdasarkan Golongan		
1.	Golongan I	0	0,00
2.	Golongan II	29	13,30
3.	Golongan III	135	61,93
4.	Golongan IV	38	17,43
5.	Golongan IX (PPPK)	16	7,34
	Total	218	100,00
XIII.	Berdasarkan Kelompok Umur		
1.	≤25	1	0,46
2.	25 - 35 tahun	27	12,39
3.	36 – 45 tahun	97	44,50
4.	46 – 55 tahun	51	23,39
5.	≥56 tahun	30	13,76
6.	≥ 58 tahun	12	5,50
	Total	218	100,00
XIV.	Berdasarkan Jenis Kelamin		
1.	Laki-laki	141	64,68
2.	Perempuan	77	35,32
	Total	218	100,00

Keragaan sumberdaya manusia di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) apabila dilihat dari tabel di atas, dapat digolongkan ke dalam jenis jabatan fungsional dan non fungsional, jenjang fungsional peneliti, jenjang fungsional penyuluh, jenjang fungsional litkayasa, jenjang fungsional pustakawan, tingkat pendidikan, golongan, kelompok umur dan jenis kelamin. Dengan melihat keragaan SDM BRPBATPP tersebut, diharapkan dapat menjadi faktor kekuatan bagi BRPBATPP untuk menjadi balai riset perikanan budidaya air tawar dan juga sekaligus sebagai balai penyuluhan perikanan yang mumpuni yang dapat mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan nantinya.

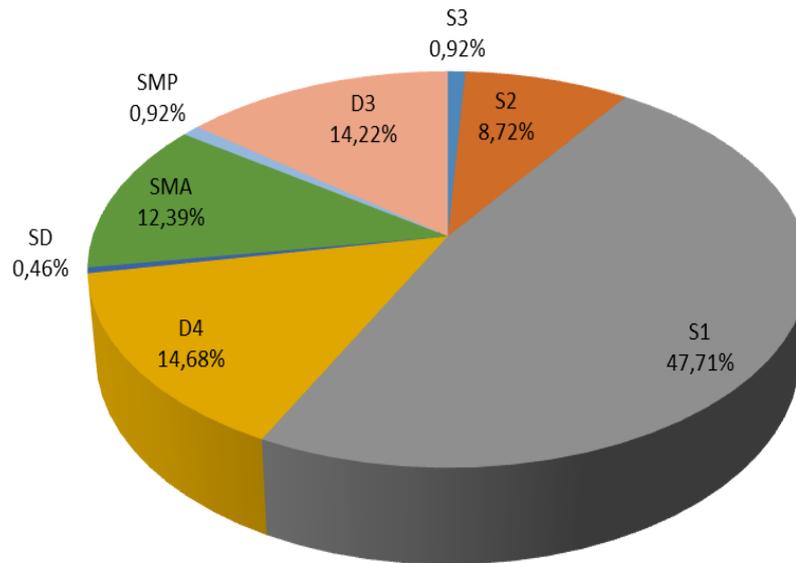
Berdasarkan Tabel 1.2. di atas, keragaan sumberdaya manusia di BRPBATPP berdasarkan jenis jabatannya dapat digambarkan pada grafik dan diagram berikut ini.



Gambar 1.2. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Jabatan Pada Triwulan I TA.2023

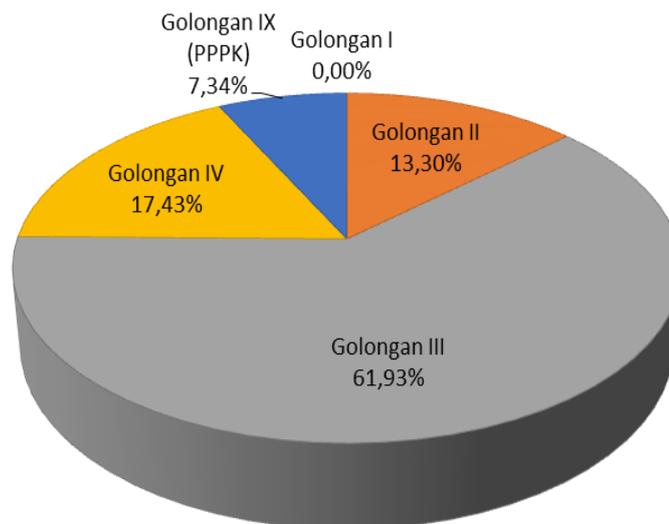
Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa urutan jumlah pegawai BRPBATPP berdasarkan jabatan fungsional dan non fungsional untuk SDM BRPBATPP adalah sebagai berikut : (1)Penyuluh Perikanan (PNS) sebanyak 161 orang, (2)Fungsional Umum sebanyak 25 orang, (3)Penyuluh Perikanan (PPPK) sebanyak 16 orang, (4)Analisis Kepegawaian sebanyak 4 orang, (5)Analisis Pengelola Keuangan APBN, Perencana, dan Instruktur masing-masing sebanyak 2 orang, (6)Pranata hubungan masyarakat, pustakawan, dan arsiparis masing-masing sebanyak 1 orang.

Komposisi SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : (1)Tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 104 orang (47,71%), (2)Tingkat pendidikan D4 sebanyak 32 orang (14,68%), (3) Tingkat pendidikan D3 sebanyak 31 orang (14,22%), (4)Tingkat pendidikan SMA sebanyak 27 orang (12,39%), (5)Tingkat pendidikan S2 sebanyak 19 orang (8,72%), (6)Tingkat pendidikan S3 dan SMP masing-masing sebanyak 2 orang (0,92%), dan (7)Tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang (0,46%). Gambaran SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Gambar 1.3. berikut ini.



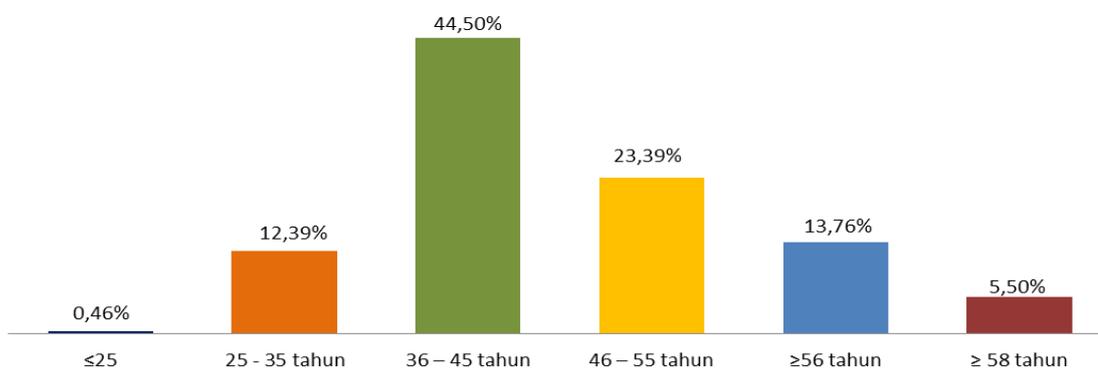
Gambar 1.3. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Triwulan I TA.2023

Selain keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat juga keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan golongan ruang. Golongan ruang III mendominasi jumlah pegawai BRPBATPP yaitu sebanyak 135 orang (61,93%), diikuti oleh golongan IV sebanyak 38 orang (17,43%), golongan II sebanyak 29 orang (13,30%), golongan IX (PPPK) sebanyak 16 orang (7,34%), sedangkan untuk golongan I sudah tidak terdapat staf yang memiliki golongan I. Berikut diagram keragaan SDM berdasarkan golongan ruang sebagaimana tersaji pada Gambar 1.4. berikut ini.



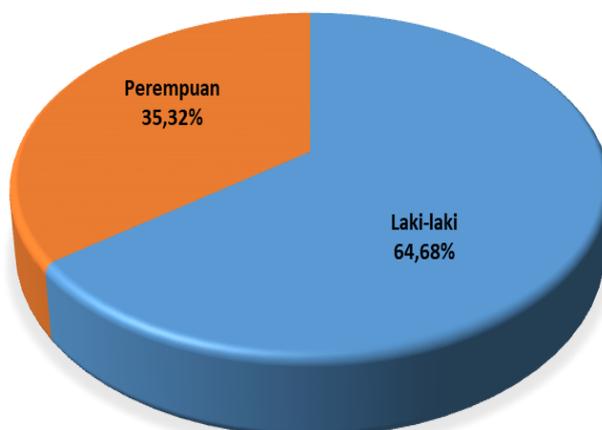
Gambar 1.4. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Golongan Ruang Pada Triwulan I TA.2023

Keragaan SDM BRPBATPP dapat dilihat juga berdasarkan kelompok umur yang dibagi menjadi 6 (enam) kelompok. Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat dilihat komposisi umur dengan urutan sebagai berikut : (1)Kelompok umur 36–45 tahun dengan jumlah 97 orang (44,50%), (2)Kelompok umur 46-55 tahun dengan jumlah 51 orang (23,39%), (3)Kelompok umur ≥56 tahun dengan jumlah 30 orang (14,22%), (4)Kelompok umur 25–35 tahun dengan jumlah 27 orang (12,39%), (5)kelompok umur ≥58 tahun dengan jumlah 12 orang (5,50%), dan (6) Kelompok umur ≤25 tahun dengan jumlah 1 orang (0,46%). Sebagai gambaran keragaan SDM BRPBATPP dilihat dari kelompok umur dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 1.5. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Kelompok Umur Pada Triwulan I TA.2023

Data keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan jenis kelamin juga diperlukan dalam rangka menyajikan informasi terkait kesetaraan gender di lingkup BRPBATPP. Berikut ini diagram yang menyajikan jumlah SDM yang ada di BRPBATPP berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 1.6. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Triwulan I TA.2023

Pada gambar diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BRPBATPP lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 141 orang (64,68%) jika dibandingkan dengan perempuan yaitu sejumlah 77 orang (35,32%). Hal ini disebabkan karena BRPBATPP merupakan balai riset perikanan dan penyuluhan sehingga lebih banyak kegiatan yang dilakukan di lapangan yang membutuhkan pegawai laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan pegawai perempuan. Namun demikian, BRPBATPP tetap berupaya dalam mengikuti program pemerintah dalam melakukan penyetaraan gender dengan tetap melibatkan pegawai perempuan dalam melakukan aktivitas perkantoran maupun kegiatan riset dan penyuluhan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai perempuan.

Untuk meningkatkan kualitas serta kapabilitas SDM Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, maka balai selalu mendorong pegawainya baik yang fungsional maupun non fungsional untuk mengembangkan kemampuannya melalui tugas belajar dan ijin belajar dengan berbagai jenjang pendidikan, serta melalui diklat maupun pelatihan. Untuk kedepannya, diharapkan dengan komposisi SDM BRPBATPP tersebut dapat mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi BRPBATPP sebagai lembaga riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan.

E. POTENSI, PERMASALAHAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Potensi dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan meliputi sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta anggaran yang mendukung kegiatan. Sumberdaya manusia yang mendukung BRPBATPP terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, serta pejabat fungsional umum yang mendukung pelaksanaan kegiatan BRPBATPP sebagaimana yang disebutkan pada keragaan SDM sebelumnya.

Prasarana dan sarana pendukung untuk kegiatan BRPBATPP antara lain adalah tanah, bangunan kantor, hatchery dan kolam percobaan untuk menghasilkan teknologi budidaya air tawar yang aplikatif dan efisien, ruang pertemuan, perpustakaan, dan laboratorium terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Pengujian karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Beberapa laboratorium yang dimiliki oleh BRPBATPP antara lain adalah : (1) Lab Reproduksi dan Genetika Ikan, (2) Lab

Nutrisi dan Teknologi Pakan, (3) Lab Lingkungan dan Toksikologi, dan (4) Lab Kesehatan Ikan. Beberapa aset yang dimiliki oleh BRPBATPP s/d Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3. Aset BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023

No.	Nama Aset	Kuantitas	Nilai (Rp.)
A	Tanah		95,685,186,000
1	Tanah Persil (m ²)	16,345	52,488,531,000
2	Tanah Non Persil (m ²)	35,940	43,196,655,000
B	Peralatan dan Mesin		34,417,738,748
1	Alat Besar Darat (unit)	3	339,040,934
2	Alat Bantu (unit)	66	271,759,424
3	Alat Angkutan Darat Bermotor (unit)	12	2,336,147,242
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (unit)	3	2,117,663
5	Alat Bengkel Bermesin (unit)	1	4,500,000
6	Alat Ukur (unit)	38	118,334,065
7	Alat Pengolahan (unit)	339	769,834,310
8	Alat Kantor (unit)	315	1,002,617,864
9	Alat Rumah Tangga (unit)	2160	3,912,346,293
10	Alat Studio (unit)	25	195,642,305
11	Alat Komunikasi (unit)	18	33,850,000
12	Peralatan Pemancar (unit)	8	1,027,396,014
13	Alat Kedokteran (unit)	23	1,199,925,436
14	Unit Alat Laboratorium (unit)	865	20,396,957,751
15	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir (unit)	17	658,775,273
16	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika (unit)	5	143,332,060
17	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (unit)	26	355,237,573
18	Peralatan Laboratorium Hydrodinamika (unit)	1	12,635,000
19	Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi (unit)	7	81,376,102
20	Persenjataan Non Senjata Api (unit)	1	12,430,000
21	Alat Khusus Kepolisian (unit)	2	24,860,000
22	Komputer Unit (unit)	97	1,058,954,221
23	Peralatan Komputer (unit)	63	247,215,535
24	Alat Pelindung (unit)	2	841,565

No.	Nama Aset	Kuantitas	Nilai (Rp.)
25	Alat Kerja Penerbangan (unit)	1	20,724,000
26	Unit Peralatan Proses/Produksi (unit)	77	190,888,118
C	Gedung dan Bangunan		42,713,003,500
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja (unit)	96	38,650,306,500
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal (unit)	21	2,076,950,000
3	Tugu/Tanda batas (unit)	11	1,985,747,000
D	Jalan dan Jembatan		381,691,000
1	Jalan (m ²)	1,887	245,882,000
2	Jembatan (m ²)	30	135,809,000
E	Irigasi		662,585,000
1	Bangunan Air Irigasi (unit)	17	468,489,000
2	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai (unit)	13	32,319,000
3	Bangunan Pengembangan Sumber Air (unit)	2	157,784,000
4	Bangunan Air Bersih / Baku (unit)	1	3,993,000
F	Jaringan		1,007,968,320
1	Instalasi Air Bersih (unit)	1	49,939,700
2	Instalasi Gardu Listrik (unit)	2	328,572,170
3	Instalasi Gas (unit)	1	5,055,000
4	Jaringan Listrik (unit)	2	624,401,450
G	Aset Tetap Lainnya		275,652,000
1	Bahan Perpustakaan Tercetak (unit)	375	250,652,000
2	Barang Bercorak Kesenian (unit)	1	25,000,000
H	Aset Tak Berwujud		1,068,989,400
1	Paten (buah)	13	1,068,989,400
	Jumlah Total		176,212,813,968

Sumber : Data BMN BRPBATPP Semester 1 Tahun 2022

Anggaran untuk kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berasal dari dua (2) buah Pusat yaitu : (1) Pusat Riset Perikanan untuk kegiatan riset dan kegiatan pendukungnya; dan (2) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan untuk kegiatan penyuluhan.

Penganggaran BRPBATPP sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu

(*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Anggaran untuk kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berasal dari dua (2) Eselon II / Pusat yaitu : (1) Pusat Riset Perikanan untuk kegiatan riset; dan (2) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan untuk kegiatan penyuluhan. Anggaran BRPBATPP pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4. Anggaran BRPBATPP TA.2018-2022

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Tahun (Rp.000)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Pegawai	55.321.876	48.374.369	41.267.109	37.934.850	35.234.181
2.	Belanja Barang	12.366.286	18.833.404	15.899.721	15.075.908	12.960.142
3.	Belanja Modal	4.351.472	-	132.824	410.738	190.000
Total Anggaran		72.039.634	67.207.773	57.299.654	53.421.496	48.384.323

Sumber : Data DIPA BRPBATPP Tahun 2018 - 2022

Pada tahun 2018, anggaran BRPBATPP mengalami peningkatan sebesar Rp.58.386.193.000,- (427,63%). Peningkatan ini disebabkan oleh bergabungnya penyuluh perikanan dari 3 Propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat) sebanyak 227 orang dibawah Satminkal Bogor sehingga belanja pegawai meningkat drastis. Kemudian pada tahun 2019, anggaran BRPBATPP mengalami penurunan sebesar Rp.4.831.861.000,- (6,71%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena berkurangnya jumlah penyuluh perikanan menjadi 183 orang serta tidak adanya belanja modal. Pada tahun 2020, anggaran BRPBATPP kembali mengalami penurunan sebesar Rp.9.908.119.000,- (14,74%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena berkurangnya jumlah penyuluh perikanan menjadi 163 orang serta menurunnya belanja barang. Pada tahun 2021, anggaran BRPBATPP kembali mengalami penurunan sebesar Rp.3.979.158.000,- (6,94%) yang disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada tahun 2022, anggaran BRPBATPP mengalami penurunan kembali sebesar Rp.5.037.173.000,- (9,42%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena berpindahnya sebagian besar peneliti dan litkayasa ke BRIN serta menurunnya belanja barang dan belanja modal.

Untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan penyuluhan, BRPBATPP memiliki penyuluh perikanan yang telah melakukan tugas pada periode 2018–2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;
2. Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
3. Pendampingan bantuan pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, ice flake, dll.);
4. Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
5. Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
6. Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;
7. Pendataan Pelaku Usaha KP (KUSUKA) dan sampling produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sampai dengan akhir Maret 2023, jumlah penyuluh perikanan yang terdapat di BRPBATPP adalah sebanyak 357 orang yang terdiri dari 161 orang PNS, 16 orang PPPK, dan 180 orang PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) yang tersebar di 41 Kabupaten / Kota di 3 propinsi, yaitu Propinsi Banten, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat.

Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh BRPBATPP dalam pelaksanaan program riset dan penyuluhan perikanan untuk mendukung pembangunan KP antara lain :

- 1) Kerangka regulasi yang mengikat untuk pemanfaatan hasil riset oleh Ditjen teknis sebagai landasan penyusunan kebijakan, sehingga peran BRPBATPP untuk mendukung BRSDM sebagai Inhouse Consultant lebih optimal, belum tersedia.
- 2) Sarana dan prasarana Riset belum sepenuhnya ter-update mengikuti perkembangan kebutuhan riset.
- 3) Kegiatan dan pemanfaatan hasil riset yang terintegrasi lintas eselon I dan eselon II lingkup BRSDM belum sepenuhnya terbangun.
- 4) Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;

- 5) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- 6) Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
- 7) Sistem monitoring terhadap penyuluh perikanan masih belum memadai karena cakupan wilayah terlalu luas dengan anggaran monitoring yang kurang memadai.

BRPBATPP memiliki mandat untuk melaksanakan program riset perikanan, khususnya riset perikanan budidaya air tawar serta kegiatan penyuluhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri KP No.74 Tahun 2020. Fokus riset yang dikembangkan adalah riset pada ikan air tawar spesifik lokal potensial atau ikan-ikan asli perairan Indonesia yang memiliki potensi untuk dijadikan komoditas nasional bahkan ekspor, contohnya yaitu ikan tor, baung, gabus, gurame, tapah, udang galah dan lain-lain. Namun pada tahun 2022 telah dilakukan pengalihan tugas dan fungsi riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Peraturan Presiden No.33 Tahun 2021 tentang “Badan Riset dan Inovasi Nasional”, sehingga BRPBATPP sudah tidak melaksanakan fungsi riset di bidang perikanan air tawar.

Lingkungan strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPBATPP meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknes) BRPBATPP, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (opportunity) dan ancaman (threats) BRPBATPP. Selanjutnya dilakukan analisa SWOT yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan dari BRPBATPP kedepannya.

Beberapa arah kebijakan BRPBATPP yang terkait kegiatan penyuluhan yang selaras dengan kebijakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP serta mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain adalah :

- 1) Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan.
- 2) Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme 42 Penyelenggaraan Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh.

- 3) Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama perikanan.
- 4) Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (cyber extension); dan Temu: aplikasi, percontohan, dan lain-lain.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan mendukung program terobosan KKP melalui kegiatan penyuluhan sebagai berikut :

- 1) Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan kepada kelompok pelaku utama/usaha pada kawasan budidaya KP;
- 2) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok);
- 3) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi);
- 4) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan;
- 5) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomodasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan melalui metode penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
- 6) Memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya dalam hal kelembagaan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKJ)

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sampai dengan akhir Maret tahun 2023, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) pada akhir Triwulan I Tahun 2023 terhadap rencana / target kinerja (*performance plans*) Triwulan I Tahun 2023. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di triwulan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :

- **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan ringkasan dari laporan kinerja periode tahun berjalan, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I TA. 2023
- **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan SDM BRPBATPP, dan sistematika Laporan Kinerja;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan Rencana Strategis BRPBATPP tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja BRPBATPP TA. 2023, serta Pengukuran Kinerja;
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan hasil capaian dari indikator-indikator kinerja serta analisisnya pada akhir Triwulan I TA.2023;
- **Bab IV – Penutup**, menyajikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja di Triwulan I TA.2023 beserta permasalahan dan rekomendasinya;

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS**
- B. RENCANA KERJA TAHUNAN**
- C. PERJANJIAN KINERJA**
- D. PENGUKURAN KINERJA**



A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu *“Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”*. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRPBATPP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BRPBATPP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan penyuluhan.

Pembentukan BRSDM KP termasuk didalamnya BRPBATPP selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana peran riset dan iptek sangat dibutuhkan masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai lompatan inovasi telah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dunia harus dimanfaatkan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya masyarakat pemanfaat untuk mendorong akselerasi pertumbuhannya.

Keberadaan BRPBATPP sendiri memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dan BRSDM KP melalui kegiatan penyuluhan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Salah satu kenyataan yang dihadapi pada sektor perikanan umumnya usaha perikanan didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat pendidikan pembudidaya ikan, pengolah ikan maupun nelayan (pelaku utama) masih rendah, dan bermodal kecil. Kondisi dengan skala usaha kecil umumnya belum mampu menerapkan teknologi inovatif sehingga menjadi kurang efisien dan akan berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan. Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan KP dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, BRPBATPP telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Penyuluhan KP. Kegiatan Penyuluhan KP mulai masuk ke dalam DIPA BRPBATPP pada tahun 2018. Adapun Indikator Kinerja/Output dan capaiannya untuk tahun 2018-2022 yang menjadi tanggung jawab BRPBATPP dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Penyuluhan KP BRPBATPP Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TARGET					CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga Penyuluh Yang Melakukan Penyuluhan	220	455	-	-	-	220	455	-	-	-
2	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan	4.478	3.411	3.464	3.464	3.546	4.478	3.411	3.520	4.156	3.679
3	Percontohan Penyuluhan KP	1	3	1	1	3	1	3	1	1	3
4	Legalisasi Izin Usaha Mikro Kecil dan Pendirian Koperasi Sektor KP	681	636	-	-	-	681	636	-	-	-
5	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	-	-	205	-	-	-	-	246	-	-
6	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	-	-	215	-	-	-	-	258	-	-
7	Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina	-	-	576	-	-	-	-	580	-	-
8.	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRBATPP	-	-	-	75	137	-	-	-	81	146
9.	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP	-	-	-	150	268	-	-	-	180	452

NO	INDIKATOR	TARGET					CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
10.	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP	-	-	-	-	1.084	-	-	-	-	1.106
11.	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRPBATPP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung Visi Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang berlandaskan pada Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong” melalui riset dan inovasi iptek perikanan serta penyelenggaraan penyuluhan.

2. Misi

Misi BRPBATPP adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah naungan 2 (dua) Pusat, yaitu Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 harus mampu menjalankan tujuan dari Pusat Riset Perikanan maupun Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tersebut. Tujuan yang ingin dicapai BRPBATPP selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
2. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi perikanan budidaya air tawar yang berdaya saing.
3. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi perikanan budidaya air tawar mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP

4. Sasaran

Renstra BRPBATPP tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRPBATPP dalam mendukung target kinerja sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda Balanced Score Card (BSC). Pada tahun 2023 telah dilakukan Reviu terhadap target kinerja yang tercantum pada Bab IV Dokumen Rencana Strategis BRPBATPP Nomor 239/BRSDM-BRPBATPP/RC.221/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021.

Beberapa indikator yang disesuaikan volume targetnya, narasi serta satuannya antara lain:

- a. Perubahan target indikator “Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPBATPP” dari 137 kelompok menjadi 120 kelompok yang disesuaikan berdasarkan jumlah SDM Penyuluh dibawah Satminkal BRPBATPP, jumlah kelompok yang disuluh yang diharapkan dapat meningkat kelasnya dibawah Satminkal BRPBATPP serta target IKU atasan;
- b. Perubahan target indikator “Jumlah Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP” dari 3.546 kelompok menjadi 3.800 kelompok yang disesuaikan dengan jumlah anggaran pendukungnya serta target IKU atasan;
- c. Perubahan target indikator kinerja “Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP” dari 1.084 orang menjadi 889 orang yang disesuaikan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP yang terdiri dari PPB, PPS, dan UMKM yang disuluh.
- d. Perubahan narasi indikator “Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di Satminkal BRPBATPP” menjadi “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP” serta perubahan target dan satuan indikator kinerja dari 1 produk menjadi 5 kelompok yang disesuaikan berdasarkan capaian IKU Tahun 2021 serta target IKU atasan;
- e. Indikator kinerja “Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP” tidak tercantum pada Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2023 karena tidak ada target untuk indikator kinerja tersebut dari atasan;
- f. Indikator kinerja “Hasil riset BRPBATPP yang Dimanfaatkan oleh Sektor Industri” tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2023 karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 78 Tahun 2021 sehingga tidak ada lagi kegiatan riset;
- g. Indikator kinerja “Hasil riset Produk biologi hasil riset BRPBATPP” tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2023 karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 78 Tahun 2021 sehingga tidak ada lagi kegiatan riset;
- h. Indikator kinerja “Hasil riset Teknologi hasil riset BRPBATPP” tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2023 karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 78 Tahun 2021 sehingga tidak ada lagi kegiatan riset;
- i. Perubahan narasi Indikator kinerja “Jejaring dan/atau kerjasama riset BRPBATPP yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti” menjadi “Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP” serta perubahan target yang semula tidak ada target menjadi 2 kemitraan;

- j. Perubahan target Indikator kinerja “Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP (%)” dari $\leq 1\%$ menjadi $\leq 0,5\%$;
- k. Perubahan target indikator “Persentase unit kerja BRPBATPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” dari 86 menjadi 92 menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya serta target atasan;
- l. Perubahan narasi Indikator Kinerja “Nilai NKA BRPBATPP” menjadi “Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP” dan perubahan target dari 81 menjadi 82 sesuai dengan target atasan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP, maka terdapat arahan untuk mencantumkan 2 (dua) Indikator kinerja yang baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yaitu:

1. Nilai PM SAKIP BRPBATPP (nilai) dengan target 80,5
2. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 75%

Hasil Reviu atas Revisi Rencana Strategis BRPBATPP Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2. Hasil Reviu atas Revisi Rencana Strategis BRPBATPP Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Renstra	PK	Keterangan
SK.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	IKSK.01.01	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	4.175	3.800	
		IKSK.01.02	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	75	120	
		IKSK.01.03	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	150	268	
		IKSK.01.04	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	-	889	
SK.02	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	IKSK.02.01	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	4	5	
SK.03	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan	IKSK.03.01	Nilai PNBK BRPBATPP (Rupiah Miliar)	-	0,09	IKU baru pada tahun 2023 arahan dari atasan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Renstra	PK	Keterangan
Satker	IKSK.03.02	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	1	0,5		
	IKSK.03.03	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	75	78		
	IKSK.03.04	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	-	81		
	IKSK.03.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	80	92		
	IKSK.03.06	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	84	92		
	IKSK.03.07	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	75	IK Mandatory baru pada tahun 2023 arahan dari atasan	
	IKSK.03.08	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	89		
	IKSK.03.09	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	86	82		
	IKSK.03.10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	-	2		
	IKSK.03.11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100	100		
	IKSK.03.12	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100	100		

Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja “Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP”, dengan target pada tahun 2023 sejumlah 120 kelompok.

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah” Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat” dengan Indikator Kinerja:

- 1) Nilai PNBK BRPBATPP, dengan target pada tahun 2023 sejumlah 0,09 Milyar.
- 2) Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP, dengan target pada tahun 2023 sebanyak 889 orang.

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BRPBATPP melalui Sasaran Strategis ke Sembilan (SS-9) “Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas” dengan indikator kinerja :

- 1) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA.2022 (%) dengan target 1% dari tahun 2021–2024;
- 2) Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks) dengan target 73 pada tahun 2021 dan menjadi 76 pada tahun 2024;
- 3) Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai) dengan target 80,5 pada tahun 2023;
- 4) Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai) dengan target 80% dari tahun 2021–2024;
- 5) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%) dengan target 84% dari tahun 2021–2024;
- 6) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 75% pada tahun 2023;
- 7) Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai) dengan target 89 dari tahun 2021–2024;
- 8) Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai) dengan target 86 dari tahun 2021–2024;
- 9) Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan) dengan target 2 kemitraan pada tahun 2023;
- 10) Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%) dengan target 100% dari tahun 2021–2024;
- 11) Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%) dengan target 100% dari tahun 2021–2024.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, rencana kerja BRPBATPP Tahun 2023 meliputi 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal adalah Rp.47.130.248.000,- yang terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran awal Rp.10.265.280.000,-;
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal Rp.36.864.968.000,-.

Sampai dengan akhir Triwulan I TA.2023, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPBATPP sebanyak 1 kali, yaitu :

1. Revisi 01 DIPA BRPBATPP TA.2023

Revisi 01 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 9 Februari 2022. Revisi dilaksanakan dalam rangka revisi halaman III DIPA. Revisi ke 01 ini tidak mengubah pagu anggaran sehingga anggaran tetap sejumlah Rp.47.130.248.000,-.

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2023

Perjanjian kinerja BRPBATPP Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Balai Riset Penelitian Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Eselon II terkait, yaitu Kepala Pusat Riset Perikanan dan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja (IK) dan target.

1. PERJANJIAN KINERJA BRPBATPP DENGAN PUSAT RISET PERIKANAN

Perjanjian kinerja level 3 BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan pada tahun 2023 ini terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2023. Adapun rincian perjanjian kinerja BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dengan Pusat Riset Perikanan

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		3 Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78
		4 Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5
		5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92
		6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92
		7 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8 Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89
		9 Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82
		10 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2
		11 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100

2. PERJANJIAN KINERJA BRPBATPP DENGAN PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perjanjian kinerja level 3 BRPBATPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2023 ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2023. Adapun rincian perjanjian kinerja BRPBATPP dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023 dengan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	3.800
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	120
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	268
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100

Dari kedua perjanjian kinerja antara BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tersebut selanjutnya digabung dengan dilakukan penyesuaian terhadap urutan indikator kinerja sesuai dengan urutan Sasaran Kegiatan yang mengacu pada perjanjian kinerja KKP, BRSDM KP, Pusat Riset Perikanan, dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Berikut tabel yang menyajikan perjanjian kinerja gabungan antara BRPBATPP dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Gabungan antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA.2023

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	3.800
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	120
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	268
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Nilai PNBK BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092
		7	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5
		8	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78
		9	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5
		10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92
		11	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	92

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		BRPBATPP (%)	
		12 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		13 Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89
		14 Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82
		15 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2
		16 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100
		17 Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100

Pada perjanjian kinerja gabungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, BRPBATPP memiliki 3 sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Untuk setiap sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan indikator kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan pada tahun 2023 untuk semua Sasaran Kegiatan adalah berjumlah 17 Indikator Kinerja (IK).

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari 2 (dua) Program yang dilaksanakan BRPBATPP pada tahun 2023, maka selanjutnya dijabarkan kedalam Aktivitas, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) sebagaimana berikut ini :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 Kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output :
 1) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3.805 Kelompok Masyarakat)
 Rincian Output :

- a. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP (3.800 Kelompok Masyarakat)
- b. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan (5 Kelompok Masyarakat)

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- 1) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal (4 layanan)
 - a. Layanan BMN (1 layanan)
 - b. Layanan Hubungan Masyarakat (1 layanan)
 - c. Layanan Umum (1 layanan)
 - d. Layanan Perkantoran (1 layanan)
- 2) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Manajemen SDM Internal (42 orang)
 - a. Layanan Manajemen SDM (42 orang)
- 3) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3 dokumen)
 - a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen)
 - b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 dokumen)
 - c. Layanan Manajemen Keuangan (1 dokumen)

Perjanjian kinerja sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5 di atas, selanjutnya dituangkan ke dalam rencana aksi atau inisiatif strategis. Rencana aksi atau inisiatif strategis adalah kegiatan yang tertuang di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) yang merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Masing-masing kegiatan yang terdapat di RKA-KL terkait dengan anggaran tahun berjalan. Penanggung jawab kegiatan di RKA-KL terkait juga dengan penanggung jawab indikator kinerja yang dibagi oleh Kepala BRPBATPP ke subbagian umum, koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

Rencana aksi BRPBATPP disusun pada awal tahun atau setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan dilakukan revisi jika diperlukan. Rencana aksi berisi target output / volume dan progres fisik masing-masing kegiatan yang menjadi pendukung Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BRPBATPP per bulan dalam tahun 2023.

D. PENGUKURAN KINERJA

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual Indikator Kinerja yang ada pada masing-masing Indikator.

Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah :

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum Ada Penilaian	

2. Metode Pengukuran Kinerja

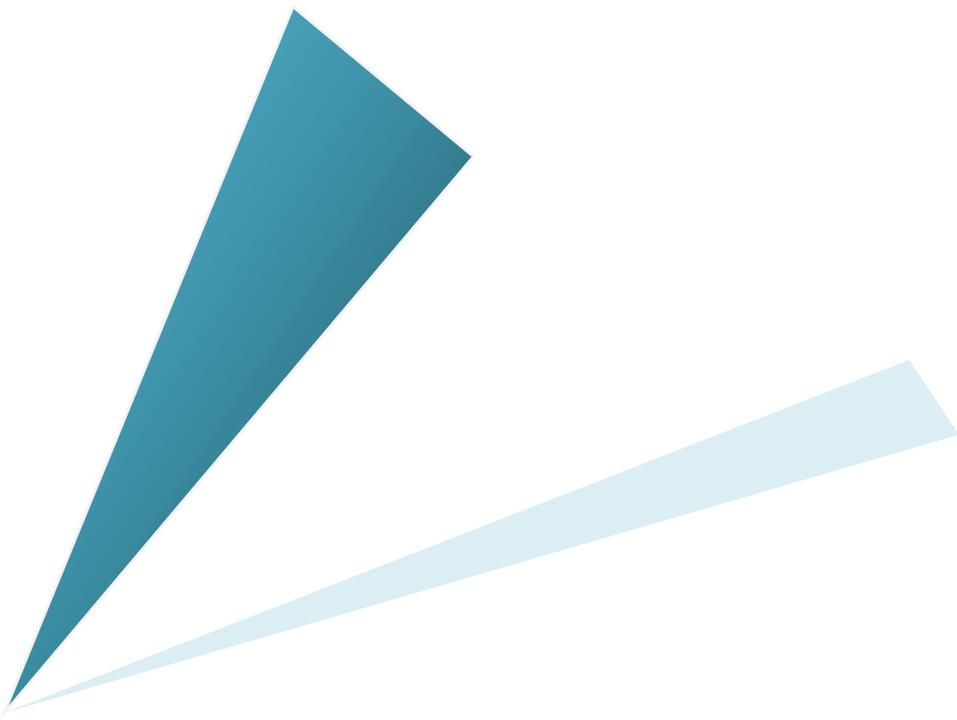
Metode pengukuran kinerja lingkup BRPBATPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, telah ditugaskan kepada Sub-Tim Pengukuran, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala BRPBATPP Nomor:B.16/BRSDM-BRPBATPP/RC.600/I/2023 tanggal 12 Januari 2023.

BAB III.

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022**
- B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**
- D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI
SUMBERDAYA BRPBATPP**



A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indikator, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan I Tahun 2023 sebesar 111,64%, yang dapat dilihat pada dashboard kinerja sebagai berikut :



Gambar 3.1. Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I TA. 2023

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan BRPBATPP di akhir Triwulan I TA. 2023, dari 17 IK BRPBATPP yang terdapat target ada 7 indikator kinerja dengan rincian capaian adalah : 3 (tiga) indikator kinerja memiliki capaian kinerja istimewa dengan indikator kinerja berwarna biru dan mencapai nilai 110–120, dan 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian kinerja baik dengan indikator kinerja berwarna hijau dan mencapai nilai 90- <110.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPBATPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja (IK) BRPBATPP pada Sasaran Kegiatan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN I TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	3.800	460	552	120,00
	2 Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	120	-	-	-
	3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	268	90	103	114,44
	4 Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889	-	-	-
2 Terselenggaranya Percontohan	5 Kelompok Masyarakat	5	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TA. 2023	TRIWULAN I TA.2023		
					TARGET	CAPAIAN	%
	Penyuluhan KP		yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)				
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092	0,092	0,180	195,74 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
		7	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5	-	-	-
		8	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78	-	-	-
		9	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5	-	-	-
		10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92	-	-	-
		11	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92	92	100	108,70
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
		13	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	-	-	-
		14	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN I TA.2023			
			TARGET	CAPAIAN	%	
	15	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2	-	-	-
	16	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100	100	100	100
	17	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100	100	100	100

Catatan : Data berdasarkan aplikasi e-kinerja pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran kegiatan ini BRPBATPP berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu “Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Meningkat” melalui Sasaran Kegiatan BRPBATPP “Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Dari kegiatan penyelenggaraan penyuluhan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok yang dibina sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok pelaku usaha / utama yang disuluh. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 4 (empat) indikator kinerja yang mendukungnya yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1

Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya. Indikator kinerja ini merupakan komponen pembentuk bagi indikator kinerja Puslatluh KP sehingga capaian dari BRPBATPP mempengaruhi capaian dari Puslatluh KP.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh dan telah disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 3.800 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sejumlah 460 kelompok, s/d Triwulan II sejumlah 1.500 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 2.800 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 3.800 kelompok.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah: (1)Data Kelompok Masyarakat KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Satker, dilengkapi dengan link data dukung profil kelompok yang dilengkapi lampiran SK Penumbuhan dan atau Piagam Peningkatan Kelas Kelompok; dan (2)Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
427	2.681	405	3.800	460	552	120	36,30	4.686	11,78

Pada Triwulan I tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP adalah sejumlah 552 kelompok (120,00%) dari target 460 kelompok.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan I, maka pada Triwulan I Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebanyak 147 kelompok (36,30%). Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian Triwulan I dengan target pada renstra di tahun 2024, maka persentase capaiannya adalah sebesar 11,78%.

Meningkatnya capaian indikator kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2022 antara lain disebabkan oleh : (1)Telah dilaksanakannya pemantauan rutin terhadap capaian kinerja penyuluh perikanan melalui pelaksanaan laporan mingguan, dan (2)Sebagian penyuluh perikanan telah melakukan updating profil kelompok yang menjadi binaannya yang sesuai dengan pedoman penyusunan profil, sehingga dapat dijadikan data dukung untuk capaian Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 ini.

Capaian Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh ini berdasarkan keragaan usahanya terdiri dari : (1) Kelompok Usaha Bersama (KUB) berjumlah 60 kelompok, (2) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 433 kelompok, (3) Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 58 kelompok, dan (4) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berjumlah 1 kelompok.

Capaian Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh ini berdasarkan keragaan kelas kelompoknya terdiri dari : (1) Kelompok Pemula berjumlah 401 kelompok, (2) Kelompok Madya berjumlah 150 kelompok, dan (3) Kelompok Utama berjumlah 1 kelompok.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Penyuluhan terhadap kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Terbitnya Peraturan Kepala BRSDM KP No. 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan P3K, dan Penyuluh Perikanan Bantu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
3. Kelompok pelaku utama / usaha yang disuluh telah melakukan penyusunan profil kelompok maupun updating data profil kelompok sebagai data dukung untuk indikator kinerja Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Indikator Kinerja 2

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPBATPP

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan : (1)Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai KepMen KP No. 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat,

bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan kriteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau (2)Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 120 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sejumlah 0 kelompok (tidak terdapat target), s/d Triwulan II sejumlah 10 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 40 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 120 kelompok.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah: (1) Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang meningkat kelasnya (ditambahkan kolom yang berisi Nomor Berita Acara Penilaian/ No. Sertifikat / No. Reg dan nilainya), atau data kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang didampingi dan dinilai kelasnya dan dalam proses penetapan, beserta nama penyuluh perikanan pembina; (2) Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan, dan (3) Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)									
Realisasi TW I 2020-2021			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	1	-	120	-	-	-	-	75	-

Pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum terdapat target maupun capaian untuk Indikator Kinerja Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPBATPP. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari Indikator Kinerja ini. Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan penyuluhan perikanan dan koordinasi kegiatan penyuluhan tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023;
2. Menyampaikan sasaran kinerja penyuluh perikanan tahun 2023 melalui surat Plt. Kepala BRPBATPP Nomer : B.191/BRPBATPP-BRSDM/TU.210/I/2023 tanggal 30 Januari 2023;
3. Menghimbau kepada penyuluh untuk melakukan penilaian dan peningkatan kelas tidak di akhir tahun.

Peningkatan kelas kelompok berdasarkan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, meliputi beberapa kriteria penilaian yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Penguasaan teknologi;
2. Pengorganisasian;
3. Skala Usaha;
4. Kemampuan Permodalan;
5. Kemitraan/Kerjasama; dan
6. Akses informasi pasar

Berdasarkan tolok ukur tersebut, kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350.
2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650.
3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000.

Kegiatan penunjang dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain adalah kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Indikator Kinerja 3

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 268 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sejumlah 90 kelompok, s/d Triwulan II sejumlah 150 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 210 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 268 kelompok.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah: (1) Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dibentuk (ditambahkan kolom yang berisi Berita Acara Pembentukan/ register sertifikat pengukuhan) beserta nama penyuluh perikanan pembina, (2) Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan

pimpinan, dan (3) Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	94	55	268	90	103	114,44	87,27	150	68,67

Pada Triwulan I tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP adalah sejumlah 103 kelompok (114,44%) dari target 90 kelompok.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan I, maka pada Triwulan I Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebanyak 48 kelompok (87,27%). Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian Triwulan I dengan target pada renstra di tahun 2024, maka persentase capaiannya adalah sebesar 68,67%.

Meningkatnya capaian indikator kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2022 antara lain disebabkan oleh: (1)Telah dilaksanakannya pemantauan rutin terhadap capaian kinerja penyuluh perikanan melalui pelaksanaan laporan mingguan, dan (2) Terdapat banyak kelompok baru yang ditumbuhkan oleh Penyuluh Perikanan sesuai dengan target pada SKP serta data dukungannya.

Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk ini berdasarkan keragaan usahanya terdiri dari : (1) Kelompok Usaha Bersama (KUB) berjumlah 71 kelompok, (2) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 16 kelompok, dan (3) Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 16 kelompok.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Pembentukan kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru sehingga penyuluh dapat mencapai targetnya.
3. Fenomena bantuan pemerintah bagi kelompok aspirasi menjadi salah satu faktor pendukung dengan tumbuhnya kelompok-kelompok baru binaan Penyuluh.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Indikator Kinerja 4

Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BRPBATPP (orang)

Pada indikator kinerja ini, tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.

Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BRPBATPP diantaranya adalah : Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Swadaya, dan UMKM yang disuluh.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP. Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 889

orang. Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah Data tenaga kerja terlibat by name by address yang disahkan pimpinan.

Capaian indikator kinerja Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (Orang)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	889	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum terdapat target untuk Indikator Kinerja Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari Indikator Kinerja ini. Pada renstra 2020-2024, tidak terdapat target untuk indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaian untuk indikator kinerja ini dengan target pada tahun 2024.

Capaian kinerja ini berasal dari rekap tenaga kerja yang terdiri dari : (1)Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), (2)Penyuluh Perikanan Swadaya (PPS), dan (3)UMKM binaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPBATPP.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain adalah :

- (1) Membuat rekap tenaga kerja Penyuluh Perikanan Bantu yang bersumber dari Surat Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2023, tanggal 3 Januari 2023.

Pada SK Kepala BRSDM tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PPB di wilayah kerja BRPBATPP adalah berjumlah 181 orang dengan rincian : (a) Propinsi Banten 29 Orang, (b) Propinsi DKI Jakarta 15 orang, dan (c) Propinsi

Jawa Barat 137 orang. Namun kemudian terdapat 1 orang PPB yang mundur yaitu dari Kabupaten Bekasi, sehingga jumlah total PPB menjadi 180 orang.

- (2) Membuat rekapan tenaga kerja Penyuluh Perikanan Swadaya yang berjumlah 351 orang yang bersumber dari Surat Keputusan sebagai berikut :
- a. SK Kepala BRSDM KP NOMOR 88/KEP-BRSDM/2020 tentang Penetapan Penyuluh Perikanan Swadaya Tahun 2020,
 - b. SK Kepala BRSDM KP NOMOR 150/KEP-BRSDM/2020 tentang Penetapan Penyuluh Perikanan Swadaya Tahun 2020,
 - c. SK Kepala BRSDM KP NOMOR 155/KEP-BRSDM/2020 tentang Penetapan Penyuluh Perikanan Swadaya Tahun 2020,
 - d. SK Kepala BRSDM KP No.573 Tahun 2021 Tentang Penetapan PPS Tahun 2021, dan
 - e. SK Kepala BRSDM KP No.17 Tahun 2022 Tentang Penetapan PPS Tahun 2022.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Pada sasaran kegiatan ini, BRPBATPP berperan serta dalam mendukung Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan yaitu “Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP” melalui sasaran kegiatan BRPBATPP “Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP”. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 1 (satu) indikator kinerja yang mendukungnya yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja 5

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal percontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan percontohan dan Pedoman SFV.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman percontohan dan Pedoman SFV.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja pada akhir tahun 2023 adalah sejumlah 5 kelompok masyarakat. Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah: (1) Rekap data Pelaksanaan Percontohan di Satminkal, (2) Laporan Pelaksanaan Percontohan; dan (3) Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)									
Realisasi TW I 2020-2021			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	5	-	-	-	-	5	-

Pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum terdapat target untuk Indikator Kinerja Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok). Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari Indikator Kinerja ini. Pada renstra 2020-2024, terdapat target untuk indikator kinerja ini sejumlah 5 pada tahun 2024.

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini terdapat 5 (lima) kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) dengan rincian sebagai berikut :

I. Percontohan Kegiatan Budidaya

a. Smart Fisheries Village (SFV) Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

- Pada tanggal 13-15 Februari 2023 telah dilaksanakan survey lokasi dan pemetaan awal kegiatan SFV, serta inisiasi pertemuan dengan perangkat desa dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Pertemuan inisiasi kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Kawali Jl. Siliwangi, Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Kunjungan kerja berasal dari Tim BRPBATPP yang diketuai oleh Plt. Kepala BRPBATPP beserta Tim dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) serta Penyuluh Perikanan Kabupaten Ciamis yang diterima oleh Kepala Desa Kawali, Camat Kawali Kabupaten Ciamis.
- Pada tanggal 8 Maret 2023 di OP Room Setda Kabupaten Ciamis, dilaksanakan pembahasan draft Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Manusia Kelautan dan dan Perikanan di Desa Perikanan (SFV) Kabupaten Ciamis. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Camat, Sekretaris Desa Kawali, Perwakilan Dinas Koperasi Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perwakilan

dinas PUPR dan pertanahan, Perwakilan Kampung Nila Kawali dan perwakilan dari SKPD lingkup Kabupaten Ciamis.

Pada pertemuan ini juga dilaksanakan pembahasan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Di Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Kabupaten Ciamis. Beberapa hal penting yang dihasilkan pada saat diskusi dalam pertemuan sebagai berikut :

1. Pemda Kabupaten Ciamis sangat mendukung kegiatan SFV karena sejalan dengan visi misi Bupati yaitu Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera untuk semua.
2. Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan Pembahasan Nota Kesepakatan antara Pemda Ciamis dengan BRSDMKP tentang “Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Kabupaten Ciamis” dan dilanjutkan dengan Rencana Kerja dari Kegiatan SFV
3. Untuk implementasi nota kesepakatan, Pemda akan membentuk Forum Lintas Stakeholdes setelah Nota Kesepakatan di tanda tanganin, Forum Lintas Stakeholders akan di tetapkan dengan SK Bupati Ciamis bertujuan agar kegiatan dapat kesinambungan dengan kegiatan yang berjalan
4. Semua program dan kegiatan yang ada di dinas Kabupaten Ciamis turut mendukung program SFV seperti dinas pariwisata, dimana akan menjadikan Lokasi SFV sebagai destinasi wisata, sedangkan Dinas Kominfo menyampaikan bahwa Smart Fisheries Village sejalan dengan program Smart City.
5. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Bappeda akan mendorong CSR untuk mendukung kegiatan SFV
6. Sekretaris Daerah juga berharap produk-produk yang ada untuk dapat disertifikasi, seperti sertifikat benih, induk, dan sertifikat produk olahan
7. Harapannya nota kesepakatan dapat segera ditandatangani guna percepatan pelaksanaan program SFV Desa Kawali.

- Dilaksanakan pembahasan draft naskah kerjasama/kemitraan (NK) serta rencana kerja (RK) pada tanggal 10 April 2023

Berikut dokumentasi kegiatan SFV Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023.



Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan SFV Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Triwulan I TA.2023

II. Percontohan Kelembagaan Sosek

a. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk Mendukung Program Prioritas KKP

Tujuan kegiatan : (1)Penilaian dampak sosial ekonomi proses bisnis KPB/KALAJU pada lokasi terpilih, (2)Melaksanakan penguatan kelembagaan digitalisasi, korporasi dan promosi bisnis perikanan dan konservasi sesuai dengan tipologi lokasi terpilih, (3) Menyusun strategi keberlanjutan proses bisnis KPB/KALAJU pada lokasi terpilih.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023 antara lain adalah :

- (1) Penyusunan KAK KPB/KALAJU yang melibatkan tim internal BBRSEKP dan lintas BRSDM KP

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan berupa :

- a. *Lesson learn* pengembangan desa Panembangan dengan agenda Sharing pengembangan desa Panembangan dan arahan Kepala

BBRSEKP terkait kegiatan 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023

- b. Diskusi rencana orientasi kerja BBRSEKP dengan agenda Penyusunan Orientasi kerja BBRSEKP yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023
- c. Diskusi dukungan BBRSEKP terhadap program KPB/KALAJU dengan agenda Penyusunan dukungan BBRSEKP terhadap program KPB/KALAJU yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023
- d. Diskusi Kegiatan 2023 dengan agenda Sharing Session program PIT, BCL, dan Revitalisasi Tambak Udang yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2023

(2) Penyusunan Kegiatan untuk Triwulan II Tahun 2023

Rencana kegiatan pada Triwulan II untuk masing-masing lokasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan yang akan dilaksanakan. Untuk lokasi Desa Panembangan akan difokuskan untuk Penilaian Outcome; Finalisasi digitalisasi tata kelola pemerintahan (Simpel Desa) dan bisnis perikanan dan Rancangan peraturan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan asset desa (fisik dan digital) yang telah dibangun; serta Sosialisasi konsep kelembagaan KPB/KALAJU. Lokasi Desa Sumberdodol akan melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan, digitalisasi dan sarana promosi. Untuk lokasi Desa Patra Tani akan melaksanakan Fasilitasi kelembagaan dan digitalisasi.

b. Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village (Karakteristik Konservasi, Ikan Hias dan Pengukuran Dampak)

Tujuan kegiatan : (1) Penilaian dampak sosial ekonomi proses bisnis Smart Fisheries Village pada lokasi terpilih, (2) Melaksanakan penguatan kelembagaan digitalisasi, korporasi dan promosi bisnis perikanan dan konservasi sesuai dengan tipologi lokasi terpilih, dan (3) Menyusun strategi keberlanjutan proses bisnis Smart Fisheries Village pada lokasi terpilih.

Lokasi kegiatan :

1. Desa Panembangan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah

Tema "SFV Mina Padi". Strategi pelaksanaan kegiatan berupa Penilaian Outcome; Finalisasi digitalisasi tata kelola pemerintahan (Simpel Desa) dan bisnis perikanan (Agree Fisheries) dan Rancangan peraturan

mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan asset desa (fisik dan digital) yang telah dibangun; serta Sosialisasi konsep kelembagaan SFV.

2. Desa Sumberdodol, Kab. Magetan, Jawa Timur
Tema “SFV Wisata dan Budidaya Ikan Koi”. Strategi pelaksanaan Fasilitasi pengembangan kelembagaan, digitalisasi dan sarana promosi;
3. Desa Patratani, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
Tema “SFV Konservasi”. Strategi pelaksanaan Fasilitasi kelembagaan dan digitalisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023 antara lain adalah :

(1) Penyusunan KAK

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan berupa :

- a. *Lesson learn* pengembangan desa Panembangan dengan agenda Sharing pengembangan desa Panembangan dan arahan Kepala BBRSEKP terkait kegiatan 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023
- b. Diskusi rencana orientasi kerja BBRSEKP dengan agenda Penyusunan Orientasi kerja BBRSEKP yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023
- c. Diskusi dukungan BBRSEKP terhadap program SFV dengan agenda Penyusunan dukungan BBRSEKP terhadap program SFV yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023
- d. Diskusi Kegiatan 2023 dengan agenda Sharing Session program PIT, BCL, dan Revitalisasi Tambak Udang yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2023

(2) Penyusunan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

Rencana kegiatan pada Triwulan II untuk masing-masing lokasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan yang akan dilaksanakan. Untuk lokasi Desa Panembangan akan difokuskan untuk Penilaian Outcome; Finalisasi digitalisasi tata kelola pemerintahan (Simpel Desa) dan bisnis perikanan (Agree Fisheries) dan Rancangan peraturan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan asset desa (fisik dan digital) yang telah dibangun; serta Sosialisasi konsep kelembagaan SFV. Lokasi Desa Sumberdodol akan melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan, digitalisasi dan

sarana promosi. Untuk lokasi Desa Patra Tani akan melaksanakan Fasilitasi kelembagaan dan digitalisasi.

c. Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut

Tujuan kegiatan : (1) Mengidentifikasi kebutuhan pembentukan /penguatan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi, sarana promosi), (2) Memfasilitasi pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan korporasi usaha perikanan, (3) Memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi untuk pelayanan desa/ pengembangan usaha perikanan, dan (4) Memfasilitasi penguatan promosi usaha perikanan.

Output yang dihasilkan: (1) Tersedianya list kebutuhan pembentukan /penguatan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi, sarana promosi, (2) Terfasilitasinya pembentukan/penguatan kelembagaan korporasi usaha perikanan, (3) Terfasilitasinya penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi bisnis untuk pelayanan desa/ pengembangan usaha perikanan, dan (4) Terfasilitasinya penguatan promosi usaha perikanan.

Lokasi Kegiatan :

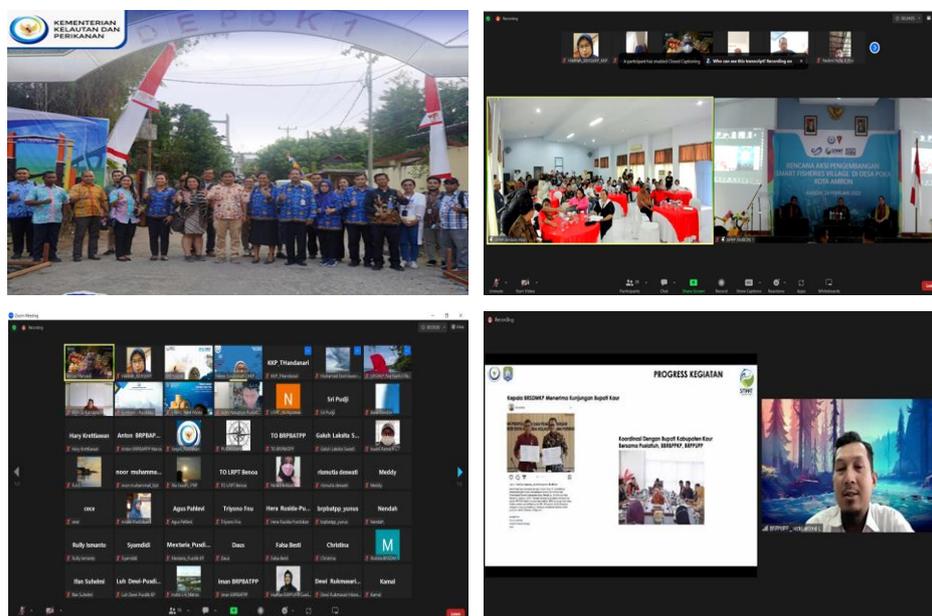
1. Desa Poka, Kecamatan Talak Ambon, Kota Ambon, Maluku
Tema : SFV Lobster
2. Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu
Tema : SFV Gurita
3. Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
Tema : SFV Rumput Laut, Udang, Bandeng
4. Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali
Tema : SFV Kepiting/Rajungan
5. Desa Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
Tema : SFV Eduwisata Pesisir Laut

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023 antara lain adalah :

1. Menyusun KAK yang merupakan gabungan dari 5 lokasi SFV dengan tipologi laut yaitu lokasi Desa Linau, Bengkulu; Desa Ajakkang Soppeng, Makasar; Desa Budeng, Bali dan Desa Nagari Parit, Sumatera Barat

2. Koordinasi internal BRSDM KP dengan masing-masing satker yang ada di lingkup BRSDM KP dan menghasilkan pembagian peran dukungan dari setiap satker pada pengembangan SFV tahun 2023
3. Koordinasi dan Rencana Aksi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Desa Poka Kota Ambon
4. Koordinasi dan Rencana Aksi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Desa Linau, Kabupaten Kaur, Bengkulu
5. Koordinasi dan Rencana Aksi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
6. Koordinasi dan Rencana Aksi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Desa Budeng, Kecamatan Jembarana, Kabupaten Jembrana, Bali
7. Koordinasi dan Rencana Aksi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Desa Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat

Berikut dokumentasi kegiatan SFV Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut.



Gambar 3.3. Dokumentasi Kegiatan Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan *Smart Fisheries Village* di Lokasi Tipologi Perikanan Air Laut pada Triwulan I TA.2023

d. Korporasi dan Digitalisasi Pengembangan Smart Fisheries Village di Lokasi Tipologi Perikanan Air tawar

Tujuan : (1)Mengidentifikasi kebutuhan pembentukan /penguatan kelembagaan, pemanfaatan aplikasi digitalisasi, sarana promosi), (2)Memfasilitasi pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan korporasi usaha perikanan, (3)Memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi untuk pelayanan desa/ pengembangan usaha perikanan, dan (4)Memfasilitasi penguatan promosi usaha perikanan.

Program SFV Perikanan Darat yang dicanangkan oleh BRSDM, dengan fokus kegiatan penguatan kelembagaan, fasilitasi digitalisasi dan sarana promosi. Adapun lokasi SFV Perikanan Darat yang adalah:

1. Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Tema : SFV Nila
2. Desa Sungai Dua, Kec.Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Tema : SFV Patin
3. Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
Tema : SFV Ikan Nilem

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023 antara lain adalah :

1. Melaksanakan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
Penyusunan KAK dilaksanakan sejak bulan Januari 2023, yang diawali penyusunan ruang lingkup kegiatan SFV. Fokus pelaksanaan SFV yang akan dilakukan oleh BBRSEKP adalah penguatan kelembagaan, digitalisasi dan sarana promosi
2. Koordinasi Internal BRSDM KP
Perubahan kebijakan di lingkup BRSDM cukup dinamis, sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan satker lain di lingkup BRSDM. Koordinasi dengan satker lain, yaitu Pusat Penyuluhan KP, Balai Riset Perikanan Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan , serta Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Perikanan KP.
3. Melakukan survei awal calon lokasi SFV Ciamis

Pada Triwulan I, BRPATPP bersama BBRSEKP melakukan survei awal untuk mengidentifikasi rona awal di calon lokasi SFV Ciamis. Berdasarkan hasil survei awal, SFV Ciamis akan dilaksanakan di Desa Kawali Kabupaten Ciamis. Secara topografi, sebagian besar (73%) Desa Kawali berada di daerah dataran yang berbukit-bukit (60 ha), selebihnya 12% kawasan berada di dataran tinggi/ pegunungan (10 ha) dan 15% Kawasan berada di daerah bantaran sungai. Ada pun pemanfaatan lahan, didominasi tanah perkebunan, tanah kering dan tanah sawah. Lokasi yang disurvei adalah Dusun Banjarwaru, dimana terdapat 10 ha Kawasan perikanan budidaya dengan komoditas ikan Nila. Di calon lokasi SFV sudah terdapat beberapa kelembagaan yang sudah terbentuk, antara lain adalah pembesaran dan pengolahan. Berdasarkan hasil diskusi, maka akan dibentuk kelembagaan baru.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP, pelaporan online Penyuluh Perikanan, SKP Penyuluh Perikanan yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Sasaran Kegiatan 3

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Pada sasaran kegiatan ini BRPBATPP berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu “Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas” melalui Sasaran Kegiatan BRPBATPP “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker tersebut dilakukan dengan meningkatkan nilai PNBK, meminimalisir nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP, meningkatkan profesionalitas ASN BRPBATPP, meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja BRPBATPP, meningkatkan nilai PM SAKIP, menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP, menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BRPBATPP khususnya dan lingkup KKP umumnya dengan berperan serta aktif

menginformasikan kegiatan BRPBATPP melalui aplikasi kinerjakp.bitrix24.com, meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran BRPBATPP, meningkatkan nilai kinerja anggaran BRPBATPP, serta melakukan kegiatan layanan Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRBATPP.

Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang mendukungnya yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja 6

Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)

Definisi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah :

- Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum daari PNBP adalah :
 - 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
 - 2) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
 - 3) PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 4) PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - 6) PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN
 - 7) PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan menghitung Nilai PNBP SDA ditambah Nilai PNBP lainnya. Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan.

Target sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 0,092 Rupiah Milyar. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sejumlah 0,092 Rupiah Milyar, s/d Triwulan II sejumlah 0,092 Rupiah Milyar, s/d Triwulan III sejumlah 0,092 Rupiah Milyar, dan s/d Triwulan IV sejumlah 0,092 Rupiah Milyar.

Bukti capaian untuk indikator kinerja ini adalah Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNBP dari Kepala Satker ke Pusat.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai PNBP BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Milyar)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021									
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	0,092	0,092	0,180	195,74 atau 120 (pada aplikasi kinerja ku)	-	-	-

Pada Triwulan I tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Nilai PNBP BRPBATPP adalah sejumlah 0,180 Rupiah Milyar (195,74% atau 120,00% pada aplikasi kinerja ku) dari target 0,092 Rupiah Milyar. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan Triwulan I tahun 2022.

Nilai PNBP BRPBATPP pada tahun 2023 ini berasal dari penerimaan fungsional dan umum dari beberapa akun sebagai berikut :

Tabel 3.8. Akun Penerimaan PNBP Fungsional dan Umum BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023

No.	Kode Akun	Keterangan
I. Penerimaan PNBP Fungsional		
1	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
2	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
3	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
II. Penerimaan PNBP Umum		
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
2	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
3	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Sedangkan untuk capaian PNBP BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Penerimaan PNBP BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023

No.	Bulan	Jenis Penerimaan PNBP		
		Fungsional	Umum	Jumlah
1	Januari	30.350.000	9.752.803	40.102.803
2	Februari	4.260.940	883.002	5.143.942
3	Maret	6.815.625	127.886.535	134.702.160
Total		41.426.565	138.522.340	179.948.905

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Nilai PNBP BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Terdapat akun baru pada penerimaan PNBP fungsional yang berasal dari Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual yang merupakan pembayaran atas penjualan vaksin yang diproduksi oleh PT. Caprifarmindo Laboratories sesuai dengan Perjanjian Lisensi yang ditandatangani oleh pihak BRPBATPP dengan PT. Caprifarmindo Laboratories;

2. Terdapat akun baru pada penerimaan PNBPN umum yang berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, yaitu berupa hasil penjualan mobil melalui lelang yang dilaksanakan secara terbuka melalui situs website lelang.go.id. yang merupakan milik Kemenkeu.

Kegiatan dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, memasukkan indikator kinerja ini ke dalam SKP pegawai terkait pelaporan nilai PNBPN, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan layanan dukungan manajerial.

Indikator Kinerja 7

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)

Indikator kinerja ini merupakan nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan menghitung batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2022 (audited) tidak melebihi $\leq 0,5\%$ dari total realisasi anggaran BRPBATPP Tahun 2022.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sebesar $\leq 0,5\%$. Bukti capaian untuk indikator kinerja ini adalah Surat Penyampaian Nilai LHP BPK dari BRSDM KP

Capaian indikator kinerja Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA.2022 pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	0,5	-	-	-	-	1	-

Pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum terdapat target serta capaian untuk Indikator Kinerja Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA.2022. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari Indikator Kinerja ini. Pada renstra 2020-2024, terdapat target untuk indikator kinerja ini sebesar 1% pada tahun 2024.

Kegiatan penunjang untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta kegiatan monev oleh Pusrisikan maupun Sekretariat BRSDM KP.

Indikator Kinerja 8

Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)

Definisi dari indikator kinerja ini meliputi :

- (1) Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya
- (2) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018)

- (3) Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan cara menghitung indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 (empat) dimensi. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : (1). Kualifikasi; (2). Kompetensi; (3). Kinerja; dan (4). Disiplin.

1. **Kualifikasi** : Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), nilai kualifikasi= 25;
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua), nilai kualifikasi= 20;
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat), nilai kualifikasi= 15;
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda), nilai kualifikasi= 10;
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat, nilai kualifikasi= 5; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA, nilai kualifikasi= 1.
2. **Kompetensi** : Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.11. Nama Kompetensi dan Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. **Kinerja** : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.12. Nilai Kinerja Berdasarkan Nilai SKP

No.	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke bawah	1

4. **Disiplin** : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.13. Nilai Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin	5
R	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Tabel 3.14. Kategori ASN Berdasarkan Nilai IP ASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional / sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional / tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional / sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional / rendah
≤ 60	Sangat tidak profesional / sangat rendah

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah per semester. Target IP ASN sampai dengan akhir tahun 2023 adalah telah ditetapkan sebesar 78. Sedangkan target per semester adalah: Semester 1 adalah 65, dan semester 2 adalah 78.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Data tingkat pendidikan (diambil dari data dasar pada aplikasi SIMPEG Online KKP);
2. Data Kompetensi (diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi SIMPEG Online KKP);
3. Data SKP (diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP);
4. Data hukuman disiplin (diambil dari data riwayat hukuman disiplin pada aplikasi SIMPEG Online KKP);
5. Screenshot nilai IP ASN pada <http://www.ropeg.kkp.go.id/>

Capaian Indikator Kinerja (IK) Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 8 pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	78	-	-	-	-	76	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP tidak terdapat target pada Triwulan I karena target

indikator kinerja adalah per semester, sehingga persentase capaian belum ada. Sampai dengan akhir Triwulan I capaian IP ASN BRPBATPP yang tertera pada <http://www.ropeg.kkp.go.id/> adalah sebesar 66,53 (kategori rendah) yang dapat dilihat pada screenshot IP ASN per 31 Maret 2023 sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR	193	13.49	53.96 %	23.48	58.7 %	24.58	81.93 %	4.98	99.6 %	66.53	RENDAH

Gambar 3.4. Progres Nilai IP ASN pada Triwulan I Tahun 2023 pada <http://www.ropeg.kkp.go.id/>

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai IP ASN bagi pegawai lingkup BRPBATPP, yaitu antara lain adalah :

1. Melakukan monitoring dari bagian kepegawaian terkait nilai IP ASN pegawai lingkup BRPBATPP serta menyampaikan hasil evaluasi melalui memo.
2. Menghimbau kepada seluruh pegawai BRPBATPP baik melalui memo maupun media sosial (WA grup balai) untuk dapat mengikuti diklat/pelatihan/seminar dan sebagainya untuk dapat meningkatkan nilai IP ASN individu.
3. Menghimbau kepada seluruh pegawai BRPBATPP baik melalui memo maupun media sosial (WA grup balai) untuk dapat mengupload sertifikat dari kegiatan diklat/pelatihan/seminar yang telah diikuti.

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indicator kinerja tersebut ke dalam SKP masing-masing pegawai lingkup BRPBATPP.

Indikator Kinerja 9

Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Nilai PM SAKIP Level III BRSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP BRPBATPP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BRPBATPP.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan Nilai PM SAKIP Level III lingkup BRSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BRSDM. Kategori nilai PM SAKIP Level III lingkup BRSDM yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16. Kategori Nilai SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 80,5. Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah : (1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen dan atau, (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BRSDM KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai PM SAKIP BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9 pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021									
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	80,5	-	-	-	-	-	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Nilai PM SAKIP BRPBATPP tidak terdapat target pada Triwulan I karena target indikator kinerja adalah tahunan, sehingga persentase capaian belum ada. Demikian juga dengan capaian tahun sebelumnya pada Triwulan I juga tidak ada karena indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru pada tahun 2023 ini.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja Nilai PM SAKIP BRPBATPP, yaitu antara lain adalah :

1. Melakukan updating serta mengunggah dokumen SAKIP pada <https://esr.menpan.go.id>;
2. Mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Implementasi SAKIP lingkup BRSDM KP Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Sekretariat BRSDM KP secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan luring di Hotel Mirah Bogor pada tanggal 12-14 April 2023;
3. Melengkapi dokumen SAKIP yang diperlukan untuk melakukan penilaian mandiri SAKIP lingkup BRPBATPP.

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan kegiatan pengukuran mandiri SAKIP.

Indikator Kinerja 10

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)

Rekonsiliasi kinerja BRPBATPP adalah proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup BRPBATPP. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja BRPBATPP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja yang dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu :

1. **Aspek Kepatuhan (bobot 25%)**, yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja:
(a) Perjanjian Kinerja; (b) Manual Indikator Kinerja ; (c) Rincian Target Indikator; (d) Laporan Kinerja; (e) Data Dukung Laporan Kinerja.
2. **Aspek Kesesuaian (bobot 25%)**, yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku:
 - a. Kesesuaian Target Kinerja (Perjanjian Kinerja – Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku).
 - b. Kesesuaian Realisasi Kinerja (Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku)
 - c. Kesesuaian pada Sistem Aplikasi (Manual IKU – Rincian Target IKU – Aplikasi kinerjaku).
3. **Aspek Ketercapaian (bobot 30%)**, diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku.
4. **Aspek Ketepatan (bobot 20%)**, diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-SakipReviu

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (25% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (25% x Nilai Aspek Kesesuaian) + (30% x Nilai Aspek Ketercapaian) + (20% x Nilai Aspek Ketepatan).

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 92. Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah surat penyampaian hasil rekonsiliasi kinerja dari BRSDM KP dan Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala Satker.

Capaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 10 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	-	-	92	-	-	-	-	80	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP belum terdapat target pada Triwulan I ini sehingga persentase capaian masih belum ada.

Dalam rangka untuk mencapai Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP, maka beberapa hal yang telah dilaksanakan pada Triwulan I ini antara lain adalah :

1. Melengkapi dokumen pada Triwulan I yang diperlukan pada aspek kepatuhan, yaitu : (a) Perjanjian Kinerja per Januari; (b) Manual Indikator Kinerja per Januari ; (c) Rincian Target Indikator per Januari ; (d) Laporan Kinerja Triwulan I; (e) Data Dukung Laporan Kinerja pada Triwulan I
2. Melakukan pengecekan terkait kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerja pada Triwulan I
3. Melengkapi data dukung terkait capaian kinerja sehingga antara target dan realiasi dapat tercapai atau melebihi target yang berpengaruh pada capaian skor kinerja.

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan pengukuran nilai rekonsiliasi kinerja.

Indikator Kinerja 11

Persentase Unit Kerja BRPBATPP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Definisi dari indikator kinerja ini antara lain adalah :

- (1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
- (2) Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*

Pengukuran indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
- Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*
- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**;
- Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan **poin 1**;
- Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

Cara Mengukur :

- a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (bitrix)
- b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

- Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup pejabat fungsional tertentu/personil yang ditunjuk di BRPBATPP yang masih aktif
- Pusat Riset Perikanan menyediakan data hasil rekapan pejabat tertentu/personil yang ditunjuk yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon III.

Pemenuhan Dokumen :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$

Keaktifan :

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$$

Nilai MP Unit Level III

$$MP_{\text{Unit Level II}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada Triwulan I-IV

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah 92%. Sedangkan target triwulanan dari indikator kinerja ini yaitu : Triwulan I sebesar 92%, Triwulan II sebesar 92%, Triwulan III adalah sebesar 92%, dan Triwulan IV sebesar 92%. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada Triwulan I-IV.

Bukti akhir capaian indikator kinerja ini adalah Surat Capaian IK MP dari Pusat Riset Perikanan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 11 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
87,50	100,00	100,00	92	92	100,00	108,70	0,00	84	119,05

Pada Triwulan I tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP adalah sebesar 100%(108,70%) dari target 92%.

Capaian indikator kinerja tersebut disampaikan oleh Pusat Riset Perikanan melalui surat dinas No.B.800/BRSDM.3/RC.510/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal “Penyampaian Capaian IKU Persentase unit kerja Pusat Riset Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusrisikan Triwulan I Tahun 2023”. Berdasarkan surat tersebut, BRPBATPP telah mencapai persentase MP pada Triwulan I sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan I, maka pada Triwulan I Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan karena persentase capaian pada Triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sama, yaitu sebesar 100,00%. Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian Triwulan I dengan target pada renstra di tahun 2024, maka persentase capaiannya adalah sebesar 119,05%.

Beberapa komponen yang menjadi pendukung tercapainya target indikator kinerja ini dapat dilihat pada pada tabel berikut :

Tabel 3.20.Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP pada Triwulan I TA.2023

No.	Komponen	Perhitungan Capaian			Keterangan
		Bobot (%)	Nilai (%)	Realisasi (%)	
1.	Sharing Dokumen	20	100,00	20,00	Dokumen yang telah di sharing : 1. Renstra BRPBATPP 2020-2024 / Dokumen Reviu Renstra 2020-2024 2. Manual IKU BRPBATPP TA.2023

No.	Komponen	Perhitungan Capaian			Keterangan
		Bobot (%)	Nilai (%)	Realisasi (%)	
					3. Perjanjian kinerja BRPBATPP TA.2023 4. Laporan Kinerja (LKj) TA.2022 5. Rencana Aksi BRPBATPP TA.2023 6. Rencana Kerja Tahunan BRPBATPP TA 2023
2.	Keaktifan	80	100,00	80,00	Keaktifan terdiri dari : 1. Plt.Kepala Satker mendapatkan nilai 3 2. Kasubbag Umum mendapatkan nilai 3
	% MP			100,00	

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Triwulan I tahun 2023 ini Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah mencapai 100,00%. Tercapainya target ini di dapat dari 2 (dua) komponen, yaitu: (1) Sharing dokumen 20%, (2) Keaktifan 80%.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, serta monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan keaktifan pada aplikasi *bitrix.24*.

Indikator Kinerja 12

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon III lingkup BRSDM.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan melakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II}} \times 100\%$$

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Rincian target untuk per triwulan yaitu : Triwulan I sebesar 75,00%, s/d Triwulan II sebesar 75,00%, s/d Triwulan III sebesar 75,00%, dan s/d Triwulan IV adalah sebesar 75%. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 75%.

Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah berupa Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BRSDM KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 12 pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)									
Realisasi TW I 2020-2021			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	75	75	75	100,00	-	-	-

Pada Triwulan I tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan adalah sebesar 75% (100,00%) dari target 75%.

Capaian indikator kinerja tersebut disampaikan oleh BRSDM KP melalui surat dinas B.1962/BRSDM.1/HP.510/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal “Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 Lingkup BRSDM KP”. Berdasarkan surat tersebut, BRPBATPP telah mencapai indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada Triwulan I sebesar 75% (100%).

Untuk perbandingan indikator kinerja ini dengan Triwulan I Tahun 2022 tidak dapat dilakukan karena indikator kinerja ini merupakan IKU baru sehingga tidak terdapat capaian pada tahun sebelumnya. Demikian juga perbandingan antara capaian Triwulan I dengan target Renstra 2020-2024 tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target pada tahun 2024.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi, yaitu antara lain adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BRSDM KP terkait aplikasi SIDAK yang memuat progress tindak lanjut rekomendasi dari Itjen KKP;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Itjen KKP terkait rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau Berita Acara Tindak Lanjut kegiatan evaluasi, pemantauan maupun audit yang dilaksanakan di BRPBATPP;
3. Membuat rekap rekomendasi Itjen KKP beserta berita acara tindak lanjut .

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, serta monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan dokumen tindak lanjut.

Indikator Kinerja 13

Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah indikator Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Pengukuran indikator kinerja ini melalui formulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu :

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev_n}{n}$$

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RDP sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RDP, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

$$\text{Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg} = \frac{||RBPeg_n - RDPBPeg_n||}{RDPBPeg_n} \times 100$$

$$\text{Belanja Barang : DevDIPA Bbar} = \frac{||RBBar_n - RDPBBar_n||}{RDPBBar_n} \times 100$$

$$\text{Belanja Modal : DevDIPA BMod} = \frac{||RBMod_n - RDPBMod_n||}{RDPBMod_n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja :

$$\text{DevDIPA } n = \frac{||\text{Dev DIPA BPeg} + \text{DevDIPA BBar} + \text{Dev DIPA BMod}||}{3}$$

3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = \text{Pagu BPeg} \times \text{Target BPeg Tw ke } - n$$

$$TPBelBar_n = \text{Pagu BBar} \times \text{Target BBar Tw ke } - n$$

$$TPBelMod_n = \text{Pagu BMod} \times \text{Target BMod Tw ke } - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PAN)}{(TPn)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak

- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- %GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

- Rasio Dispensasi (permil) $RDSPM = \left(\frac{SPM\ Dispensasi}{SPM\ Tw\ UV} \right) \times 1000$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah semesteran. Target pada Semester 1 adalah sebesar 80, sedangkan target pada Semester 2 adalah sebesar 89.

Tujuan dari penilaian IKPA ini menurut Kementerian Keuangan RI adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Bukti akhir capaian indikator kinerja ini adalah berupa : Surat Capaian Nilai IKU IKPA dari Biro Keuangan

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 13 pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	98,96	-	89	-	-	-	-	89	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Nilai IKPA BRPBATPP belum terdapat target pada Triwulan I ini sehingga persentase capaian masih belum ada.

Progres indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 96,95. Berikut screenshot Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN. Berikut screenshot Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.55	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.57	96.95	100%	96.95
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.56	20.00	10.00	10.00	5.00	23.39				
					Nilai Aspek	92.78		100.00					93.57			

Gambar 3.5. Nilai IKPA BRPBATPP Triwulan I TA.2023

Pada gambar di atas, dapat kita lihat perhitungan IKPA pada Triwulan I ini berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-5/PB/2022 masih belum memperhitungkan 13 indikator. Indikator yang diperhitungkan pada nilai IKPA Triwulan I meliputi 8 indikator dan 3 aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
 - a. Revisi DIPA (0%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran (0%)
 - b. Belanja Kontraktual (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e. Dispensasi SPM (5%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - a. Capaian Output (25%)

Nilai total pada form penilaian IKPA adalah sebesar 96,95 didapat dari penjumlahan nilai akhir setiap indikator pendukung pada masing-masing aspek. Sedangkan konversi bobot adalah sebesar 100% didapat dari bobot masing-masing setiap indikator pendukung pada masing-masing aspek. Dari nilai total dan konversi bobot tersebut, kemudian didapatkan nilai IKPA BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 96,95. Nilai IKPA pada Triwulan I ini belum merupakan nilai akhir yang diambil sebagai nilai capaian akhir indikator kinerja ini. Diharapkan pada akhir Triwulan IV nanti, nilai IKPA dapat tercapai sesuai dengan aspek dan indikator yang menjadi kriteria perhitungan.

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisan, serta memasukkan indikator kinerja tersebut ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan pengukuran nilai IKPA.

Indikator Kinerja 14

Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)

Merupakan indikator kinerja yang terkait pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKA > 90; (b) Baik, apabila NKA >80 - 90; (c) Cukup, apabila NKA >60 - 80; (d) Kurang, apabila NKA >50 – 60; (e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan nilai kinerja anggaran BRPBATPP melalui aplikasi SMART DJA dengan formula perhitungan sebagai berikut :

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau} \\ (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
P : penyerapan anggaran
K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
COP : capaian output program
CRO : capaian ro
NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
W_P : bobot penyerapan anggaran
W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan
W_{COP} : bobot capaian Output Program
W_{CRO} : bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$NKA \text{ K/L} = \frac{CSS + \text{rata - rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$$

Keterangan :

- NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga
CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/ lembaga atas aspek manfaat
W_E : bobot efisiensi

Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

- W_P = 9,7%
W_K = 18,2%
W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 %
W_E = 28,6%

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 82.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah : Nota Dinas dari Biro Keuangan / Capture Aplikasi SMART DJA KEMENKEU.

Penilaian kinerja anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/2011 dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 3.23. Kategori Penilaian Kinerja Anggaran

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1.	> 90% - 100%	Sangat baik
2.	> 80% - 90%	Baik
3.	> 60% - 80%	Cukup / Normal
4.	> 50% - 60%	Kurang
5.	≤ 50%	Sangat kurang

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 14 pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021									
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	82	-	-	-	-	86	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP belum terdapat target pada Triwulan I ini sehingga persentase capaian masih belum ada.

Berikut adalah progres nilai kinerja anggaran BRPBATPP berdasarkan aplikasi SMART DJA per 31 Maret 2023 sebagai gambaran nilai kinerja anggaran BRPBATPP pada Triwulan I TA. 2023.



Gambar 3.6. Screenshot Dashboard Aplikasi SMART DJA Triwulan I TA.2023

Dari gambar diatas dapat dilihat sampai dengan Triwulan I ini nilai kinerja anggaran BRPBATPP masih dalam kategori sangat kurang dengan nilai kinerja anggaran (NKA) sebesar 48,25. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa output kegiatan yang belum tercapai / terealisasi, selain itu juga realisasi anggaran masih belum banyak jika dibandingkan keseluruhan pagu anggaran yang menjadi tanggungjawab BRPBATPP pada tahun 2023 ini.

Output diharapkan akan tercapai seluruhnya di akhir tahun, demikian juga dengan penyerapan anggaran diharapkan akan terus bertambah sejalan dengan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Diharapkan, pada Triwulan II nanti, nilai kinerja anggaran akan terus meningkat sehingga di akhir tahun target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja BRPBATPP pada tahun 2023 ini.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan, serta monitoring penyerapan anggaran dan capaian output pada aplikasi SMART DJA oleh Sekretariat BRSDM KP. Selain itu juga memasukkan indikator kinerja ini ke dalam SKP pegawai yang terkait dengan pengukuran nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA.

Indikator Kinerja 15

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja BRPBATPP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama.

Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan.

Dasar Hukum:

- a. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP
- b. PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN
- c. Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah tahunan. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 2 (dua) kemitraan.

Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah :

1. Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa , Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll
2. Laporan Kegiatan Kemitraan

Capaian indikator kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 15 pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021									
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP belum terdapat target pada Triwulan I ini sehingga persentase capaian masih belum ada.

Pada tahun 2023 ini, BRPBATPP telah memiliki 2 (dua) Kemitraan yang masih berjalan yaitu :

1. Kemitraan dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bogor Pajajaran

Kemitraan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 yaitu tentang pemanfaatan BMN berupa sebagian tanah dan atau bangunan BRPBATPP yang dimanfaatkan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bogor Pajajaran yang berlangsung selama 3 tahun dan telah dilakukan perpanjangan kemitraan pada 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2023.

Terkait masa berlaku pemanfaatan BMN sebagai lahan ATM yang akan habis masa berlakunya pada tanggal 23 Desember 2023 nanti, BRPBATPP telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Sekretaris BRSDM KP dengan Nomor :B.465/BRSDM-BRPBATPP/PL.720/IV/2023 perihal “Usulan Perpanjangan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara (BMN) pada BRPBATPP Bogor” tanggal 10 April 2023 untuk selanjutnya dapat diproses ke Biro Keuangan KKP dan untuk diajukan ke Kementerian Keuangan dalam rangka persetujuan pemanfaatan BMN tersebut.

Beberapa dokumen terkait kemitraan antara BRPBATPP dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bogor Pajajaran antara lain adalah :

1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-63/MK.6/WKN.8/KNL.03/2018 perihal "Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan tanggal 28 Agustus 2018.
2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 590/KEPMEN-KP/SJ/PL.820/2018 tentang Penyewaan Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan tertanggal 9 Oktober 2018.
3. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Ruang Untuk Pengoperasian ATM BRI antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bogor Pajajaran yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2023 dengan nomor sebagai berikut :
BRPBATPP : 02/BRSDM-BRPBATPP/PKS/V/2021
BRI Bogor Pajajaran : B.1308a -XIV/KC/LOG/05/2021

2. Kemitraan dengan PT. Caprifarmindo Laboratories

Kemitraan antara BRPBATPP dengan PT. Caprifarmindo Laboratories adalah berupa kerjasama lisensi dengan PT. Caprifarmindo Laboratories No.10/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2020 dan No.043/VIII/20/CAPRI-VET yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2020.

Tujuan dari kerjasama lisensi ini adalah : (1) Salah satu upaya transfer teknologi dalam menunjang pengembangan pembangunan perikanan, (2) Untuk mentransfer teknologi secara komersial atas vaksin Hydrogalaksi.

Perjanjian lisensi ini bersifat non eksklusif yang diberikan oleh BRPBATPP kepada PT. Caprifarmindo Laboratories yang produksinya dan pemasarannya dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau untuk tujuan ekspor. Kegiatan komersialisasi yang dilakukan meliputi : (1) Produksi vaksin hydrogalaksi, (2) Promosi, distribusi, dan penjualan vaksin hydrogalaksi.

Kerjasama lisensi ini menghasilkan PNPB dari pembayaran royalti dari PT. Caprifarmindo Laboratories sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga penjualan vaksin Hydrogalaksi di tingkat distributor kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.

Jangka waktu Kerjasama lisensi ini adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan akan berakhir pada 12 Agustus 2025.

Selain kemitraan yang masih berlangsung di tahun 2023 ini, BRPBATPP juga melakukan kegiatan inisiasi kemitraan dengan PT.Pelangi Hotel Internasional sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Februari 2023 dilaksanakan rapat awal inisiasi yang bertempat di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar–Cijeruk

Pada rapat ini dibahas terkait Pemanfaatan aset Instalasi Cijeruk melalui program SFV (Smart Fisheries Village) dengan dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

2. Tanggal 24 Februari 2023 dilaksanakan rapat lanjutan bertempat di R.R. Abbas Sachlan–Sempur

Rapat membahas terkait inisiasi kerja sama untuk eduwisata/wisata pendidikan, namun kerja sama berkembang untuk pembangunan restoran dan taman bermain di Cijeruk dalam rangka KSP (Kerjasama Pemanfaatan).

Selanjutnya dilaksanakan rapat internal antara BRPBATPP dengan Pusrisikan dengan hasil rapat sebagai berikut :

- (1) Tim Kerjasama BRPBATPP akan mempelajari terkait konsep kerjasama antara Balitri Sukabumi dengan PT. Pelangi Hotel Internasional;
- (2) Perjanjian kerjasama dengan pihak swasta, pasca terbitnya Permen KP No 23 Tahun 2022 sebagai pengganti Permen KP 65 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, maka diusulkan mekanisme Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan mengacu PMK 115/PMK.06/2020;
- (3) Selama proses usulan KSP disepakati dan ditandatangani , maka saat ini mekanisme kemitraan mengacu pada PP No 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di KKP.

3. Tanggal 6-7 Maret 2023 dilaksanakan rapat koordinasi terkait draf matrik skema bagi hasil kerjasama pemanfaatan asset di SFV Mina Eduwisata Inris Cijeruk yang ditawarkan oleh PT. Pelangi hotel Internasional.

Indikator Kinerja 16

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP (%)

Indikator Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPBATPP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan :

- A. Jumlah target dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya pada tahun berjalan.
- C. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis} \\ & \text{Lainnya} = \\ & \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100\% \end{aligned}$$

Persentase dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia / dibandingkan total dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang ditargetkan.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Rincian target untuk per triwulan yaitu: Triwulan I sebesar 23,36%, s/d Triwulan II sebesar 47,52%, s/d Triwulan III sebesar 71,53%, dan s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 100%.

Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker atau Kepala Sub Bagian Umum.

Capaian indikator kinerja Presentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 16 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP (%)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	22	24,18	100	23,36	23,36	100,00	-3,39	100	23,36

Pada Triwulan I tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP adalah sebesar 23,36% (100,00%) dari target 23,36%. Untuk perbandingan persentase capaian Triwulan I Tahun 2023 terhadap target Renstra pada tahun 2024 adalah sebesar 23,36%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan I, maka pada Triwulan I Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami penurunan untuk capaiannya yaitu sebesar 3,39%.

Hal ini disebabkan oleh jumlah target dan capaian dokumen pada Triwulan I Tahun 2023 lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah target dan capaian dokumen pada Triwulan I 2022. Total seluruh dokumen dalam setahun yang menjadi data dukung pada tahun 2023 adalah sejumlah 137 dokumen dengan capaian pada Triwulan I sejumlah 32 dokumen. Sedangkan untuk total seluruh dokumen dalam setahun yang menjadi data dukung pada tahun 2022 adalah sejumlah 153 dokumen dengan capaian pada Triwulan I sejumlah 37 dokumen.

Berkurangnya jumlah dokumen sebagai data dukung capaian indikator kinerja ini adalah karena adanya perubahan data dukung berupa laporan dari masing-masing sub koordinator yang semula terbagi Tata Usaha, Tata Operasional

serta Pelayanan Teknis dan Sarana, menjadi hanya ada satu berupa laporan balai. Dan masih terdapat dokumen laporan–laporan lainnya yang dilakukan penyesuaian.

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian indikator kinerja Presentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP adalah sebesar 23,36% (100,00%) dari target 23,36%. Hal yang menjadi faktor tercapainya target indikator kinerja ini adalah telah tersedianya dokumen pendukung Presentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBATPP sejumlah 32 dokumen berupa :

1. Laporan Dalwas BMN 2022 berjumlah 1 dokumen
2. Dokumen Rekapitulasi aktifitas media social berjumlah 2 dokumen
3. Laporan Layanan Magang/PKL/KKP (Triwulanan) berjumlah 1 dokumen
4. Dokumen Revisi DIPA dan RKAKL BRPBATPP TA.2023 berjumlah 1 dokumen
5. Laporan e-monev Bappenas (Triwulan 4 TA. 2022) berjumlah 1 dokumen
6. Laporan mingguan pada Dashboard BRSDMKP berjumlah 13 dokumen
7. Laporan bulanan BRPBATPP berjumlah 3 dokumen
8. Evaluasi Rencana Aksi BRPBATPP TW I TA.2023 berjumlah 1 dokumen
9. Informasi Cascading dan Matriks Peran Hasil berjumlah 1 dokumen
10. CaLK Semester 2 2022 berjumlah 1 dokumen
11. CaLBMN Semester 2 2022 berjumlah 1 dokumen
12. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya berjumlah 3 dokumen
13. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan e-Layar berjumlah 3 dokumen

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, dan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusrisikan.

Indikator Kinerja 17

Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan

organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan persentase dokumen layanan manajemen yang tersedia / dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan. (1) Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan, (2) Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (ditandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan, (3) Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screenshot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian indikator kinerja lain.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan :

- A. Jumlah target dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang telah disusun dan diketahui pimpinan (ditandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya pada tahun berjalan.
- C. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis} \\ & \text{Lainnya} = \\ & \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100\% \end{aligned}$$

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Rincian target untuk per triwulan yaitu : Triwulan I sebesar 18,52%, s/d Triwulan II sebesar 33,33%, s/d Triwulan III sebesar 48,15%, dan s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%. Target indikator kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 100%.

Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker atau kepala sub bagian umum.

Capaian indikator kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 17 Pada Triwulan I Tahun 2023

IK. Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP (%)									
Realisasi TW I			Tahun 2023					Renstra BRPBATPP 2020-2024	
2020-2021			Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022							
-	25	29,10	100	18,52	18,52	100,00	-36,36	100	18,52

Pada Triwulan I tahun 2023 ini, capaian indikator kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP adalah sebesar 18,52% (100,00%) dari target 18,52%. Untuk perbandingan persentase capaian Triwulan I Tahun 2023 terhadap target Renstra pada tahun 2024 adalah sebesar 18,52%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada Triwulan I, maka pada Triwulan I Tahun 2023 untuk indikator kinerja ini mengalami penurunan untuk capaiannya yaitu sebesar 36,36%.

Hal ini disebabkan oleh jumlah target dan capaian dokumen pada Triwulan I Tahun 2023 sama jika dibandingkan dengan jumlah target dan capaian dokumen pada Triwulan I 2022 yaitu berjumlah 5 dokumen. Namun total seluruh dokumen dalam setahun yang menjadi data dukung pada tahun 2023 bertambah menjadi 27 dokumen Sedangkan untuk total seluruh dokumen dalam setahun yang menjadi data dukung pada tahun 2022 adalah berjumlah 17 dokumen.

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP adalah sebesar 18,52% (100,00%) dari target 18,52%. Hal yang menjadi faktor tercapainya target indikator kinerja ini adalah telah tersedianya dokumen pendukung Persentase Layanan

Dukungan Manajemen Internal di Satminkal BRPBATPP sejumlah 5 dokumen berupa :

1. Laporan Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit JF Penyuluh Perikanan berjumlah 1 dokumen.
2. Laporan bulanan Lingkup Layanan Penyuluhan berjumlah 3 dokumen.
3. Laporan Triwulanan Lingkup Layanan Penyuluhan berjumlah 1 dokumen.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP, dan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Puslatluh KP.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN I TA. 2023

Pada tahun 2023, DIPA BRPBATPP memiliki 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal adalah Rp.47.130.248.000,- yang terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran awal Rp.10.265.280.000,-;
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal Rp.36.864.968.000,-.

Sampai dengan akhir Triwulan I TA.2023, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPBATPP sebanyak 1 kali, yaitu :

1. Revisi 01 DIPA BRPBATPP TA.2023

Revisi 01 DIPA BRPBATPP TA.2023 terbit pada tanggal 9 Februari 2022. Revisi dilaksanakan dalam rangka revisi halaman III DIPA. Revisi ke 01 ini tidak mengubah pagu anggaran sehingga anggaran tetap sejumlah Rp.47.130.248.000,-.

Tabel 3.28. Revisi DIPA BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023

No.	DIPA	Tanggal Terbit DIPA / Revisi	Pagu (Rp.)	Keterangan
1.	Awal	30 November 2022	47.130.248.000	-
2.	Revisi ke 01	14 Desember 2021	47.130.248.000	Revisi halaman III DIPA

Capaian realisasi anggaran BRPBATPP pada Triwulan I tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29. Pagu dan Realisasi Anggaran BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023 (per jenis belanja)

No.	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Berdasarkan Pagu Revisi	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	28.846.338.000	6.003.113.626	20,81
2	Belanja Barang	18.283.910.000	2.945.582.823	16,11
3	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah		47.130.248.000	8.948.696.449	18,99

Catatan : Realisasi berdasarkan data OMSPAN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari 2 (dua) Program yang dilaksanakan BRPBATPP pada tahun 2023, maka selanjutnya dijabarkan kedalam Aktivitas, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) sebagaimana berikut ini :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 - Kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output :
 - 1) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3.805 Kelompok Masyarakat)
 - Rincian Output :
 - a. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP (3.800 Kelompok Masyarakat)
 - b. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan (5 Kelompok Masyarakat)

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- 1) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal (4 layanan)
 - a. Layanan BMN (1 layanan)
 - b. Layanan Hubungan Masyarakat (1 layanan)
 - c. Layanan Umum (1 layanan)
 - d. Layanan Perkantoran (1 layanan)
- 2) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Manajemen SDM Internal (42 orang)
 - a. Layanan Manajemen SDM (42 orang)
- 3) Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3 dokumen)
 - a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen)
 - b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 dokumen)
 - c. Layanan Manajemen Keuangan (1 dokumen)

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di Triwulan I tahun 2023, maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BRPBATPP di Triwulan I Tahun 2023.

Tabel 3.30. Realiasi Anggaran Per Indikator Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN 1	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)		
KEGIATAN 1. Pelatihan dan Penyuluhan KP									
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	3.800	552	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	7.765.280.000	1.205.367.739	15,52%
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	120	3				
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	268	103				
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889	-				
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5	-	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendaapatkan Percontohan Penyuluhan	2.500.000.000	86.185.686	3,45%

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN 1	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PER SENTASE (%)		
KEGIATAN 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Nilai PNPB BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092	0,180	Layanan BMN	30.500.000	6.130.000	20,10%
		7	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP	≤0,5	-	Layanan Manajemen Keuangan	41.500.000	9.897.557	23,85%
		8	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78	-	Layanan Manajemen SDM	34.000.000	2.792.936	8,21%
		9	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5	-	Layanan Perencanaan dan Penganggaran 601. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan	52.500.000	5.173.000	9,85%
		10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92	-	Layanan Monitoring dan Evaluasi 601. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan	47.500.000	1.800.000	3,79%
		11	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92	100	Layanan Umum 602. Pelayanan Teknis dan Jasa Riset Perikanan	25.500.000	7.020.900	27,53%
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	Layanan Umum 601. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Perikanan B. Dukungan Operasional Pimpinan	60.000.000	10.271.280	17,12%
		13	Nilai KPABRPBATPP (Nilai)	89	-	Layanan Umum 601. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Perikanan A. Pengelolaan Tata Usaha	42.939.000	22.664.100	52,78%
		14	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82	-	Layanan Perkantoran 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.450.988.000	1.539.299.461	20,66%
		15	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2	-	Layanan Hubungan Masyarakat	54.800.000	14.787.300	26,98%
		16	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100	23,36	Layanan Perkantoran A. Gaji dan Tunjangan Riset Perikanan	5.398.880.000	959.813.044	17,78%
		17	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100	18,52	Layanan Perkantoran B. Gaji dan Tunjangan Penyuluh Perikanan (PNS, CPNS)	21.419.548.000	4.685.516.121	21,87%
						Layanan Perkantoran B. Gaji dan Tunjangan PPPK Penyuluh Perikanan	2.027.910.000	357.784.461	17,64%
						Layanan Umum 201. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pelatihan dan Penyuluhan	118.700.000	34.192.864	28,81%
						Layanan Perencanaan dan Penganggaran 601. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan	29.000.000	-	0,00%
						Layanan Monitoring dan Evaluasi 601. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan	30.703.000	-	0,00%
		TOTAL					47.130.248.000	8.948.696.449	18,99%

Tabel 3.31. Realiasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7.765.280.000	1.205.367.739	15,52
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	2.500.000.000	86.185.686	3,45
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	36.864.968.000	7.657.143.024	20,77
TOTAL		47.130.248.000	8.948.696.449	18,99

D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA BRPBATPP TRIWULAN I TA.2023

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan, yaitu : ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi SMART DJA.

Tabel 3.32. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRPBATPP Triwulan I TA.2023

Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Rincian Output (CRO)	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai NKA
18,99	83,36	6,97	20	100	48,25

Efisiensi anggaran BRPBATPP memperoleh skor 20. Efisiensi anggaran menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan - 20. Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Realisasi anggaran pada posisi 18,99% dengan tingkat output kegiatan mencapai 100% atau melampaui.
2. Terdapat beberapa output dengan pencapaian di atas 100%, seperti:
 - + Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPBATPP dari target 460 tercapai 552 kelompok.
 - + Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP dari target 90 tercapai 103 kelompok
 - + Nilai PNBP BRPBATPP dari target 0,092 Milyar tercapai 0,180 Milyar
 - + Persentase Unit Kerja BRPBATPP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dari target 92% tercapai 100%
 - + Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dari target 75% tercapai 75%
 - + Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP dari target 23,36% tercapai 23,36%
 - + Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP dari target 18,52%, tercapai 18,52%

Pencapaian efisiensi sebesar 20 menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023, terdapat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di Triwulan berikutnya.

BAB IV.

PENUTUP

- A. CAPAIAN KINERJA UTAMA**
- B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI**



A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada Triwulan I tahun 2023, BRPBATPP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP di Triwulan I tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing sasaran strategis. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh skor kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 111,64%, sebagaimana dashboard aplikasi kinerjaku sebagai berikut :



Gambar 4.1. Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I TA. 2023 pada Dashboard Kinerjaku

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan BRPBATPP di akhir Triwulan I TA. 2023, dari 17 IK BRPBATPP yang terdapat target ada 7 indikator kinerja dengan rincian capaian adalah : 3 (tiga) indikator kinerja memiliki capaian kinerja istimewa dengan indikator kinerja berwarna biru dan mencapai nilai 110–120, dan 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian kinerja baik dengan indikator kinerja berwarna hijau dan mencapai nilai 90-

<110. Rincian target dan realiasi dari 17 Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN I TA.2023		
			TARGET	CAPAIAN	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	3.800	460	552	120,00
	2 Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	120	-	-	-
	3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	268	90	103	114,44
	4 Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889	-	-	-
2 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5	-	-	-
3 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6 Nilai PNBPN BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092	0,092	0,180	195,74 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
	7 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA. 2023	TRIWULAN I TA.2023			
			TARGET	CAPAIAN	%	
	8	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78	-	-	-
	9	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5	-	-	-
	10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92	-	-	-
	11	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92	92	100	108,70
	12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
	13	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89	-	-	-
	14	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-
	15	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2	-	-	-
	16	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100	100	100	100
	17	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100	100	100	100

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja BRPBATPP cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. IKU dengan Target Tahunan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, untuk memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Verifikasi capaian terutama untuk kegiatan penyuluhan perlu dilakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBATPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP. Akhirnya, BRPBATPP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBATPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) BRPBATPP Triwulan I tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPBATPP.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RR. Sri Pudji Sinarni Dewi**

Jabatan : **Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan**

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : **Kepala Pusat Riset Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Yayan Hikmayani

RR. Sri Pudji Sinarni Dewi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPBATPP (Rupiah Miliar)	0,092
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBATPP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBATPP TA 2022 (%)	≤0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	78
		4	Nilai PM SAKIP BRPBATPP (Nilai)	80,5
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP (Nilai)	92
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBATPP (%)	92
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBATPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8	Nilai IKPA BRPBATPP (Nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP (Nilai)	82
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBATPP (Kemitraan)	2
		11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBATPP (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.239.107.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023		13.239.107.000

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan


Yayan Hikmayani


RR. Sri Pudji Sinarni Dewi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R.R Sri Pudji Sinarni Dewi**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan
Perikanan

R.R Sri Pudji Sinarni Dewi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	3.800
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	120
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP (Kelompok)	268
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP (orang)	889
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPBATPP (kelompok)	5
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal di Satminkal BRPBATPP (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp. 10.265.280.000
2.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	Rp. 23.625.861.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan		Rp. 33.891.141.000

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan
Perikanan



R.R Sri Pudji Sinarni Dewi